

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TRANFER KE DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 2019-2023)



Oleh

Mohammad Ramadhani

NIM: 210502110147

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

SKRIPSI

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TRANFER KE DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 2019-2023)

Diusulkan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas Ekonomi (FE) Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Mempeoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)



Oleh

Mohammad Ramadhani

NIM: 210502110147

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Kemandirian
Fiskal
(Studi kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Ramadhani

NIM : 210502110147

Telah Disetujui Pada Tanggal 17 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Fadlil Abdani, M.A

NIP. 199307022019031009

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah terhadap
Kemandirian Fiskal (Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 2019-2023)

SKRIPSI

Oleh

MOHAMMAD RAMADHANI

NIM : 210502110147

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan
Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun.) Pada 26 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua Penguji

Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001

2. Anggota Penguji

Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A

NIP. 198505282019031005

3. Sekretaris Penguji

Fadiil Abdani, M.A

NIP. 199307022019031009

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Kholilah, M.S.A

NIP. 198707192019032010

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Ramadhani
NIM : 210502110147
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN**

DANA TRANSFER TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur) adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2026

saya

Mohammad Ramadhani

NIM. 219592110147

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya junjungkan, Bapak H. Ali Imron dan Ibu Hj. Sulistiyowati yang selalu memberi doa, semangat, motivasi, serta kasih sayang yang tiada henti untuk penulis.

Diri saya sendiri yang telah berjuang dan pantang menyerah sampai pada titik ini.

Seluruh keluarga, teman dekat, dan seluruh sahabat.

HALAMAN MOTTO

”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:6)

”Manusia HEBAT adalah manusia yang bisa mengendalikan diri sendiri saat dikusai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, bersyukur untuk segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya”

(Raden Totong Kiemdarto)

”Jika kamu tidak berani mengambil resiko dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa menciptakan masa depan”

(Monkey D. Luffy)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL (Studi kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 2019-2023)"** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk menempuh ujian Skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Kholilah, SE., MSA., Ak., CA., CFA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberikan arahan.
3. Fadlil Abidani, SE., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
4. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi Program Studi Akuntansi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, maupun material yang tiada henti sampai detik ini.
6. Terimakasih untuk Salmanisa Aulia Ramadani teman dekat penulis yang telah menemani, memberi semangat, dan mendoakan penulis semenjak pertama menempuh pendidikan S1 sampai menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang telah menempuh ilmu bersama.

8. Terimakasih juga buat keluarga besar IKSPI Kera Sakti Khususnya Komisariat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta teman perjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu selama penulis menempuh pendidikan di Malang.
9. Terakhir terimakasih untuk saya sendiri M. Ramadhani selaku Penulis yang telah berjuang menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih telah berproses maksimal selama ini walaupun dalam keadaan tidak mudah. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jombang, 19 juni 2026

penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL	2
SURAT PERNYATAAN	3
HALAMAN PERSEMBAHAN	4
HALAMAN MOTTO	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	12
ABSTRAK	13
<i>ABSTRACT</i>.....	14
النسخة العربية.....	15
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Rumusan Masalah.....	23
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	24
1.4.1 Manfaat Teoritis:	24
1.4.2 Manfaat Praktis:	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
2.1 Penelitian Terdahulu	26
2.2 Kajian Teoritis.....	32
2.2.1 Teori Desentralisasi Fiskal	32
2.2.1 Teori Keadilan Fiskal	35
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah	36
2.2.2 Transfer Ke Daerah	39
2.2.3 Kemandirian Fiskal	40
2.3 Integrasi Keislaman	42
2.4 Kerangka Konseptual.....	44
2.5 Hipotesis	44

2.5.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berpengaruh terhadap kemandirian fiskal	44
2.5.2	Transfer Ke Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berpengaruh terhadap kemandirian fiskal	45
2.5.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah(TKD) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal	46
BAB III METODE PENELITIAN		47
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2	Populasi dan Sampel	47
3.2.1	Populasi.....	47
3.2.2	Sampel.....	47
3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	48
3.4	Data dan Jenis Data.....	49
3.5	Definisi Operasional Variabel	50
3.5.1	Variabel Bebas/Independent (X)	50
3.5.2	Variabel Terikat/Dependen (Y)	53
3.6	Analisis Data	55
3.6.1	Statistik Deskriptif	55
3.6.2	Analisis Pemilihan Model.....	56
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	59
3.6.4	Analisis Regresi Linier Berganda	61
3.6.5	Uji Hipotesis	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Hasil Penelitian	65
4.1.1	Gambaran Obyek Penelitian	65
4.1.2	Analisis Data	70
4.1.3	Uji Asumsi Klasik	75
4.1.4	Uji Hipotesis	77
4.2	PEMBAHASAN	82
4.2.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal 82	
4.2.2	Pengaruh Transfer Ke Daerah terhadap Kemandirian Fiskal	84
4.2.2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) secara Simultan terhadap Kemandirian Fiskal	86

BAB V	88
PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 5 Kota dan Kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Jawa Timur :	17
Tabel 1. 2 5 Kota dan Kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah di Jawa Timur :	18
Tabel 1. 3 5 Kota dan Kabupaten dengan Transfer ke Daerah tertinggi di Jawa Timur :	19
Tabel 1. 4 5 Kota dan Kabupaten dengan Transfer ke Daerah tertinggi di Jawa Timur :	20
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	54
Tabel 4. 1 Transfer Ke Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2019- 2023	67
Tabel 4. 2 Kemandirian Fiskal Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2019- 2023	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Konseptual	44
Gambar 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif.....	70
Gambar 4. 2 Hasil Uji Chow.....	71
Gambar 4. 3 Hasil Uji Hausman	72
Gambar 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier	74
Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas	75
Gambar 4. 6 Uji Multikolinieritas.....	75
Gambar 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Gambar 4. 9 Hasil Uji t.....	77
Gambar 4. 10 Hasil Uji f.....	79
Gambar 4. 11 Hasil Koefisien determinasi (R^2).....	81

ABSTRAK

Mohammad Ramadhani. 2026, SKRIPSI. Judul: "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Trasfer ke Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal"

Pembimbing : Fadlil Abidani, SE., M.A.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah, Kemandirian Fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap tingkat Kemandirian Fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019–2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Data penelitian berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan hasil uji pemilihan model, Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal, yang menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari potensi daerahnya sendiri, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskalnya karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal, karena tingginya penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada sumber pendanaan eksternal dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara simultan, PAD dan TKD berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, yang mengindikasikan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut secara bersama-sama memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian fiskal.

ABSTRACT

Mohammad Ramadhani. 2026. Undergraduate Thesis. Title: “*Analysis of Local Own-Source Revenue and Transfer Funds on Fiscal Independence*”

Advisor : Fadlil Abidani, S.E., M.A.

Keywords : *Local Own-Source Revenue, Intergovernmental Transfers, Fiscal Independence.*

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Intergovernmental Transfers (TKD) on the level of Fiscal Independence of regencies and municipalities in East Java Province during the 2019–2023 period. This study is motivated by the high dependence of local governments on Intergovernmental Transfers (TKD) from the central government, resulting in the limited ability of local governments to independently finance governmental administration and regional development. Therefore, increasing Local Own-Source Revenue (PAD) is considered an important factor in achieving regional fiscal independence.

This study employed a quantitative approach using a descriptive quantitative method. The research data consisted of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) realization reports of regencies and municipalities in East Java Province obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The sampling technique used was saturated sampling, in which all 38 regencies and municipalities in East Java Province were included as the research sample. Based on the model selection tests, the Fixed Effect Model (FEM) was selected as the most appropriate estimation model.

The results indicate that Local Own-Source Revenue (PAD) has a positive and significant effect on Fiscal Independence, implying that the greater the ability of local governments to generate revenue from their own regional potential, the higher their level of fiscal independence, as dependence on the central government decreases. Conversely, Intergovernmental Transfers (TKD) have a negative and significant effect on Fiscal Independence, as a high proportion of transfer funds received from the central government reflects a greater reliance on external financial resources to finance government administration and regional development. Simultaneously, Local Own-Source Revenue (PAD) and Intergovernmental Transfers (TKD) have a significant effect on Fiscal Independence of regencies and municipalities in East Java Province, indicating that these two revenue sources jointly influence the ability of local governments to achieve fiscal independence.

النسخة العربية

محمد رمضان. 2026. رسالة جامعية بعنوان: "تحليل الإيرادات المحلية وصناديق التحويل تجاه الاستقلال المالي"
المشرف: فضال لعبيداني، الماجستير.
الكلمات المفتاحية: الإيرادات المحلية الذاتية، التحويلات الحكومية إلى المناطق، الاستقلال المالي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الإيرادات المحلية الذاتية (PAD) والتحويلات المالية إلى المناطق (TKD) على مستوى الاستقلال المالي للمحافظات والمدن في إقليم جاوة الشرقية خلال الفترة من 2019 إلى 2023. وتتبع أهمية هذه الدراسة من استمرار ارتفاع اعتماد الحكومات المحلية على التحويلات المالية الواردة من الحكومة المركزية، مما يجعل قدرة الحكومات المحلية على تمويل شؤون الإدارة الحكومية وبرامج التنمية بصورة مستقلة غير مثالية بشكل كامل. ولذلك، يُعد تعزيز الإيرادات المحلية الذاتية أحد العوامل المهمة لتحقيق الاستقلال المالي للمناطق.

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الكمي باستخدام الأسلوب الوصفي الكمي. وتمثلت بيانات الدراسة في تقارير تنفيذ ميزانية الإيرادات والنفقات الإقليمية (APBD) للمحافظات والمدن في إقليم جاوة الشرقية، والتي تم الحصول عليها من المديرية العامة للتوازن المالي (DJPK) التابعة لوزارة المالية في جمهورية إندونيسيا. كما استخدمت الدراسة أسلوب العينة الشاملة، حيث شملت جميع المحافظات والمدن في إقليم جاوة الشرقية والبالغ عددها ثمانية وثلاثين (38) محافظةً ومدينةً بوصفها عينة للدراسة. وأظهرت نتائج اختبارات النموذج أن نموذج التأثيرات الثابتة (FEM) هو النموذج الأكثر ملاءمة لتحليل بيانات الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الإيرادات المحلية الذاتية (PAD) تؤثر تأثيرًا إيجابيًا ومعنويًا في الاستقلال المالي، مما يدل على أنه كلما ازدادت قدرة الحكومات المحلية على توليد الإيرادات من مواردها وإمكاناتها الذاتية، ارتفع مستوى استقلالها المالي نتيجة انخفاض اعتمادها على الحكومة المركزية. وفي المقابل، تبين أن التحويلات المالية إلى المناطق (TKD) تؤثر تأثيرًا سلبيًا ومعنويًا في الاستقلال المالي، إذ إن ارتفاع قيمة التحويلات المالية الواردة من الحكومة المركزية يعكس استمرار اعتماد الحكومات المحلية على مصادر التمويل الخارجية في تمويل شؤون الإدارة الحكومية وبرامج التنمية. كما أظهرت النتائج أن الإيرادات المحلية الذاتية (PAD) والتحويلات المالية إلى المناطق (TKD) تؤثران معًا تأثيرًا معنويًا في الاستقلال المالي للمحافظات والمدن في إقليم جاوة الشرقية، مما يشير إلى أن هذين المصدرين للإيرادات يسهمان بصورة مشتركة في تحديد قدرة الحكومات المحلية على تحقيق الاستقلال المالي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sentralisasi menggambarkan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan sebagian besar otoritas strategis pada tingkat nasional, sehingga ruang inisiatif pemerintahan daerah berada dalam batas yang relatif sempit. Dalam konfigurasi ini, keputusan penting terkait administrasi, pembangunan, maupun pengaturan kebijakan lebih banyak dirumuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana arah kebijakan yang telah ditentukan. Menurut Nradhawati, (2019), mendefinisikan sentralisasi sebagai pemusatan kewenangan pada kelompok pengambil keputusan yang berada pada posisi tertinggi dalam struktur organisasi. Pola tersebut pernah mendominasi sistem pemerintahan Indonesia sebelum era otonomi daerah berkembang. Walaupun mampu menciptakan keseragaman kebijakan dan kontrol administratif yang kuat, model ini sering dikaitkan dengan terbatasnya kapasitas daerah untuk mengelola potensi ekonomi, sosial, maupun sumber daya yang tersedia di wilayahnya sendiri. Situasi tersebut mendorong lahirnya perubahan tata kelola pemerintahan yang mengarah pada distribusi kewenangan secara lebih luas kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi.

Perubahan paradigma pemerintahan dari pola terpusat menuju distribusi kewenangan ke daerah merupakan langkah yang banyak ditempuh berbagai negara untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Argumentasi utamanya terletak pada asumsi bahwa setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, tantangan, dan potensi yang berbeda sehingga memerlukan ruang kebijakan yang lebih fleksibel. Di Indonesia, transformasi tersebut memperoleh pijakan hukum melalui UU No. 22 1999 mengenai Pemda dan UU No. 25 1999 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Wasil et al., (2020) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, serta agenda pembangunan menggunakan sumber pendapatan yang dimiliki sendiri. Regulasi tersebut kemudian mengalami berbagai penyempurnaan melalui UU No. 32 2004, UU No. 33 2004, hingga perubahan terakhir yang termuat dalam UU No. 2 2015 dan UU No. 1 2022.

Dalam kerangka perimbangan keuangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempatkan sebagai penerimaan yang dipungut daerah sesuai ketentuan hukum daerah dan nasional. Komponen penyusunnya mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber penerimaan sah lainnya yang berasal dari aktivitas ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai mesin pendapatan yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri. Keberadaan komponen ini memperlihatkan sejauh mana suatu daerah mampu menghasilkan sumber dana tanpa bergantung pada aliran anggaran dari luar. Menurut Puja, (2019) menerangkan bahwa PAD dibentuk oleh berbagai pos penerimaan yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai penerimaan sah lainnya. Dengan demikian, PAD bukan sekadar angka yang tercantum dalam APBD, melainkan representasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah aktivitas ekonomi lokal menjadi sumber pembiayaan publik. Ketika porsi PAD mengalami peningkatan, keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan juga semakin besar karena tidak seluruh kebutuhan anggaran harus menunggu dukungan dari pemerintah pusat. Gunawan & Suebah, (2022) menjelaskan bahwa dominasi PAD dalam struktur pendapatan daerah sering digunakan sebagai penanda berkurangnya ketergantungan fiskal terhadap pusat. Oleh sebab itu, tingkat kekuatan PAD kerap dijadikan ukuran untuk membaca daya tahan ekonomi suatu daerah dalam menopang kebutuhan pemerintahannya sendiri.

Tabel 1. 1 5 Kota dan Kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Jawa Timur :

No.	Kota atau Kabupaten	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kota Surabaya	5.190,30 M	5.584,63 M	5.561,56 M	6.058,97 M	6.592,42 M
2.	Kab. Sidoarjo	1.603,00 M	1.810,10 M	1.921,24 M	1.801,98 M	1.913,14 M
3.	Kab. Gresik	909,91 M	1.163,67 M	1.132,30 M	1.215,57 M	1.610,93 M
4.	Kota Malang	533,51 M	235,50 M	776,69 M	752,80 M	1.179,18 M
5.	Kab. Malang	525,97 M	715,98 M	715,98 M	978,03 M	1.025,59 M

Sumber: Djp. Kementerian Keuangan (2025)

Pemetaan daerah dengan perolehan PAD terbesar bertujuan memperlihatkan wilayah-wilayah yang memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan internal pada tingkat yang relatif tinggi. Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik hampir selalu berada dalam kelompok teratas karena ditopang oleh konsentrasi kegiatan industri manufaktur, perdagangan, jasa, pergudangan, hingga investasi berskala besar. Aktivitas ekonomi yang padat tersebut menciptakan basis penerimaan yang luas sehingga arus pajak dan retribusi yang masuk ke kas daerah menjadi lebih besar. Situasi ini membuat ruang gerak fiskal pemerintah daerah menjadi lebih lebar dibandingkan banyak wilayah lain. Dengan kapasitas penerimaan yang kuat, kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat lebih banyak ditopang oleh sumber daya lokal dibandingkan bantuan fiskal dari pemerintah pusat.

Kapasitas fiskal daerah sering kali dikaitkan dengan kemampuan menghasilkan PAD dalam proporsi yang besar terhadap keseluruhan struktur pendapatan daerah (Melinda, 2024). menjelaskan bahwa peningkatan kontribusi PAD umumnya berjalan seiring dengan penguatan tingkat kemandirian fiskal daerah. Debora et al., (2023) juga menegaskan bahwa kapasitas keuangan daerah cenderung membaik ketika penerimaan yang bersumber dari PAD mengalami peningkatan. Sebaliknya, keterbatasan PAD sering dihubungkan dengan tingginya kebutuhan terhadap sumber pendanaan eksternal. Dalam konteks tersebut, PAD tidak hanya dipandang sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai refleksi kekuatan ekonomi lokal, efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam membangun fondasi fiskal yang berkelanjutan.

Tabel 1. 2 5 Kota dan Kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah di Jawa Timur :

No	Kota/Kabupaten	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Pacitan	166,32 M	194,71 M	200,69 M	165,60 M	199,08 M
2.	Kab. Trenggalek	280,17 M	302,58 M	268,64 M	248,23 M	279,80 M
3.	Kab. Ponorogo	247,54 M	295,14 M	271,64 M	305,36 M	310,35 M
4.	Kab. Ngawi	211,01 M	238,29 M	242,03 M	249,89 M	274,93 M
5.	Kota Blitar	173,65 M	174,02 M	187,33 M	201,83 M	183,89 M

Sumber: Djp. Kementrian Keuangan (2025)

Sebaliknya, kelompok daerah dengan PAD paling rendah memberikan gambaran mengenai keterbatasan kemampuan menghasilkan penerimaan dari wilayahnya sendiri. Kabupaten Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi menjadi contoh daerah yang masih menghadapi tantangan dalam memperbesar sumber pendapatan internal. Struktur ekonomi yang lebih banyak ditopang sektor primer, terbatasnya aktivitas industri, serta belum optimalnya eksplorasi potensi penerimaan daerah menyebabkan kapasitas fiskal wilayah-wilayah tersebut bergerak lebih lambat dibandingkan daerah perkotaan dan kawasan industri. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan mengubah potensi ekonomi menjadi penerimaan daerah masih memerlukan penguatan agar ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal dapat berkurang secara bertahap.

Menurut Mamonto et al., (2020) menjelaskan bahwa fasilitas pendanaan ini menjadi salah satu perangkat utama dalam implementasi otonomi daerah karena membantu pembiayaan layanan publik serta program kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, TKD tersusun atas beberapa komponen seperti DAU, DAK, dan DBH sebagaimana dijelaskan Laodini et al., (2023) Masing-masing komponen dirancang untuk menjawab kebutuhan yang berbeda, mulai dari pemerataan kemampuan fiskal hingga pembiayaan kegiatan prioritas tertentu Masaki (2018) menegaskan bahwa efektivitas pemanfaatan TKD tidak diukur dari terserapnya anggaran semata, melainkan dari kemampuannya menciptakan perbaikan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.

Tabel 1. 3 5 Kota dan Kabupaten dengan TKD tertinggi di Jawa Timur :

No	Kota/Kabupaten	Trasfer ke Daerah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Pacitan	1.432,09 M	1.385,44 M	1.317,69 M	1.362,47 M	1.335,17 M
2.	Kab. Trenggalek	1572,81 M	1.508,67 M	1.421,09 M	1.495,48 M	1.419,37 M
3.	Kab. Ponorogo	1.857,98 M	1.859,69 M	1.720,74 M	1.813,47 M	1.718,04 M
4.	Kab. Ngawi	1.765,17 M	1.768,69 M	1.730,23 M	1.679,24 M	1.916,64 M
5.	Kab. Tuban	1.822,16 M	1.845,75 M	1.683,81 M	1.721,89 M	2.295,51 M

Sumber: Djp. Kementerian Keuangan (2025)

Penyajian data daerah dengan penerimaan TKD tertinggi bertujuan menggambarkan wilayah yang memperoleh dukungan fiskal besar dari pemerintah pusat. Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Malang termasuk contoh daerah yang menerima alokasi tinggi karena memiliki

karakteristik kebutuhan fiskal yang besar, cakupan wilayah luas, maupun jumlah penduduk yang relatif tinggi. Besarnya alokasi tersebut mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk mempersempit kesenjangan kapasitas fiskal antarwilayah serta memastikan tersedianya sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pelayanan publik. Pada saat yang sama, tingginya proporsi Transfer ke Daerah juga dapat dibaca sebagai indikasi bahwa kemampuan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan daerah.

Tabel 1. 4 5 Kota dan Kabupaten dengan TKD tertinggi di Jawa Timur :

No	Kota/Kabupaten	Transfer ke Daerah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kota Surabaya	2.401,94 M	2.360,28 M	2.069,38 M	2.501,59 M	2.575,68 M
2.	Kab. Sidoarjo	2.127,23 M	2.196,29 M	2.014,32 M	2.267,78 M	2.376,79 M
3.	Kota Malang	1.289,52 M	1.275,09 M	1.198,11 M	1.084,31 M	1.246,31 M
4.	Kab. Gresik	1.822,96 M	1.834,00 M	1.710,22 M	1.869,69 M	1.869,31 M
5.	Kab. Mojokerto	1.769,71 M	1.732,04 M	1.682,16 M	1.570,44 M	1.712,41 M

Sumber: DjP. Kementerian Keuangan (2025)

Sebaliknya, daerah dengan penerimaan TKD relatif rendah umumnya merupakan wilayah yang memiliki kapasitas PAD lebih kuat. Surabaya, Madiun, dan Mojokerto sering ditempatkan dalam kelompok tersebut karena memiliki sumber penerimaan lokal yang mampu menopang sebagian besar kebutuhan fiskalnya. Situasi demikian memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap dukungan TKD menjadi relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain yang kapasitas PAD-nya terbatas. Perbandingan antara kelompok penerima transfer tinggi dan penerima transfer rendah memberikan gambaran yang jelas mengenai variasi tingkat kemandirian fiskal antarwilayah di Jawa Timur sekaligus memperlihatkan perbedaan kapasitas ekonomi daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri.

Perbedaan kapasitas ekonomi antarwilayah menjadi alasan utama lahirnya mekanisme transfer fiskal. Daerah yang memiliki basis ekonomi kuat umumnya mampu menghasilkan penerimaan dalam jumlah besar, sedangkan wilayah dengan aktivitas ekonomi terbatas sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya sendiri. Suandi et al., (2016) menjelaskan

bahwa transfer fiskal berfungsi sebagai alat koreksi untuk memperkecil ketimpangan tersebut sehingga kualitas pelayanan publik tidak terlalu dipengaruhi oleh lokasi geografis ataupun kapasitas ekonomi daerah. Penguatan kapasitas fiskal daerah tetap harus bertumpu pada kemampuan menghasilkan PAD. Dengan demikian, transfer fiskal berperan sebagai katalisator, sedangkan PAD tetap menjadi fondasi utama keberlanjutan keuangan daerah (Liline & Khaeril, 2024).

Derajat kemandirian fiskal sering digunakan untuk membaca tingkat ketahanan keuangan suatu daerah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan operasional maupun pembangunan melalui penerimaan internal, semakin kuat pula posisi fiskalnya. Kondisi tersebut memberikan keleluasaan dalam menentukan prioritas program tanpa tekanan yang berlebihan dari sumber pendanaan eksternal. Sebaliknya, dominasi dana yang berasal dari luar daerah mencerminkan keterbatasan kapasitas pembiayaan mandiri Masaki (2018) menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap transfer fiskal yang terlalu tinggi berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang karena keberlanjutan pembiayaannya sangat dipengaruhi keputusan pemerintah pusat.

Upaya memperkuat PAD menjadi agenda penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berkaitan langsung dengan ruang gerak fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan lokal sering ditempatkan sebagai strategi utama untuk memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan. Daerah yang mampu membangun basis PAD yang kuat akan memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal tanpa terlalu menunggu dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Nurkhayati, (2022) menjelaskan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat menjadi tantangan serius bagi stabilitas fiskal daerah karena perubahan alokasi transfer berpotensi memengaruhi pelaksanaan program yang telah direncanakan. Situasi tersebut semakin kompleks ketika kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya aparatur, dan infrastruktur pendukung belum berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan fiskal, inovasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal, serta

peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah menjadi agenda yang semakin relevan.

Di dalam struktur APBD, TKD tetap memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan utama bagi pemerintah daerah. menurut Saleh (2020) menjelaskan bahwa sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah dibangun atas prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan demokratisasi dalam distribusi sumber daya fiskal. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah pusat berupaya menyesuaikan dukungan pendanaan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah. (Debora et al., 2023) menegaskan bahwa dana perimbangan idealnya tidak dijadikan fondasi utama keberlangsungan anggaran daerah. Peran yang lebih tepat adalah sebagai instrumen pendukung yang melengkapi kemampuan fiskal lokal. Ketika ketergantungan terhadap transfer berada pada tingkat yang terlalu tinggi, daerah berpotensi menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan apabila terjadi perubahan arah kebijakan fiskal nasional. Oleh karena itu, penguatan PAD tetap menjadi agenda yang tidak dapat diabaikan dalam upaya memperkuat fondasi keuangan daerah.

Pembahasan ini menempatkan PAD dan TKD sebagai dua komponen utama yang membentuk kapasitas fiskal pemerintah daerah. Fokus kajian diarahkan pada kabupaten dan kota di Jawa Timur selama kurun 2019–2023 untuk memperoleh gambaran mengenai peran kedua sumber pendapatan tersebut terhadap tingkat kemandirian fiskal. Pemilihan tema ini didorong oleh pentingnya kemampuan daerah dalam menopang kebutuhan pembiayaannya sendiri di tengah pelaksanaan otonomi yang semakin luas. Melalui pembacaan terhadap pola penerimaan daerah, dapat diketahui sejauh mana kekuatan fiskal lokal mampu menopang aktivitas pemerintahan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada dukungan eksternal.

Berbagai fenomena yang muncul dalam tata kelola keuangan daerah memperlihatkan bahwa kemampuan pembiayaan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari komposisi sumber pendapatannya. Di antara berbagai komponen penerimaan yang tercantum dalam APBD, PAD dan TKD merupakan dua unsur yang paling dominan dalam membentuk kapasitas fiskal suatu wilayah.

Keduanya menentukan luas atau sempitnya ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan, pelayanan publik, serta kebutuhan operasional pemerintahan. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada tema “Pengaruh PAD dan Transfer ke Daerah terhadap Kemandirian Fiskal (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)” sebagai upaya memahami peranan kedua sumber penerimaan tersebut dalam membentuk kemampuan keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan, selanjutnya dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas, meliputi:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh parsial terhadap tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur?
2. Apakah Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Rangkaian persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi titik tolak dalam menentukan arah pembahasan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, sasaran utama kegiatan akademik ini difokuskan pada:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui apakah Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam periode waktu tertentu.
3. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki nilai akademik, kegiatan ini juga diharapkan menghasilkan kegunaan yang dapat dirasakan oleh berbagai kelompok kepentingan, meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Dalam ranah akademik, pembahasan ini diharapkan memperluas khazanah keilmuan pada bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah. Kajian mengenai PAD, TKD, serta kapasitas fiskal daerah masih menjadi topik yang terus berkembang karena berkaitan erat dengan dinamika desentralisasi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Di luar kepentingan akademik, materi yang dihasilkan juga diharapkan memiliki kegunaan praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur yang menghadapi tantangan berbeda-beda dalam membangun kapasitas fiskalnya.

1. Bagi Pemerintah

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi pemanfaatan Transfer ke Daerah sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan secara lebih efektif guna memperkuat kemampuan pembiayaan daerah dalam jangka panjang.

2. Bagi Lembaga Legislatif Daerah

Dapat menjadi sumber informasi tambahan dalam mengamati pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur penerimaan dan pembiayaan daerah, proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dapat terus diperkuat.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai arti penting Pendapatan Asli Daerah sebagai fondasi pembiayaan pembangunan daerah. Pemahaman tersebut diharapkan mampu mendorong kesadaran publik

mengenai pentingnya partisipasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi yang menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai layanan publik.

4. Bagi Kalangan Akademisi dan Mahasiswa

Mengembangkan pembahasan serupa dalam lingkup akuntansi sektor publik, ekonomi regional, desentralisasi fiskal, maupun tata kelola pemerintahan daerah. Keberadaan referensi yang lebih beragam akan membantu memperluas perspektif dalam memahami persoalan kemandirian fiskal di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pemahaman pajak. Berikut ini adalah ringkasan nilai perusahaan dari penelitian sebelumnya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode dan Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Deisy Debora, Meidy Kantohe, Steven V. Tarore, Margareth Rantung d. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara.	Variabel Independen: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda.	Kajian di Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa kekuatan keuangan daerah lebih banyak ditopang oleh penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri dibandingkan sumber dana eksternal. Daerah yang mampu menghasilkan PAD dalam porsi besar cenderung memiliki keleluasaan yang lebih tinggi dalam mengatur kebutuhan pembiayaan pemerintahannya. Sebaliknya, dominasi transfer dari pusat sering ditemukan pada daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya relatif lebih rendah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kondisi keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan dinamika PAD dan transfer fiskal. Kedua komponen tersebut kemudian dipandang sebagai unsur utama yang membentuk kapasitas pembiayaan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi.

2.	Helti Handraini, Aldri Frinald, Asnil, Nora Eka Putri. 2024. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat.	Variabel Independen: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana perimbangan Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah	studi dokumen.	Pada Pasaman Barat, struktur penerimaan daerah masih didominasi oleh aliran dana dari pemerintah pusat sehingga kemampuan pembiayaan yang bersumber dari potensi lokal belum berkembang secara optimal. Situasi tersebut membuat ruang fiskal daerah relatif terbatas ketika harus menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat berpotensi menciptakan kerentanan apabila terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional. Meskipun demikian, kajian tersebut juga mengidentifikasi peluang perbaikan melalui perluasan sumber penerimaan lokal, pengembangan sektor ekonomi potensial, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan daerah
3.	Ledy Jeane Liline, Khaeril Khaeril. 2024. Dampak Pendapatan Asli Daerah, Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku.	Variabel Independen: Dampak Pendapatan Asli Daerah, Transfer Ke Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Fiskal	Analisis Indeks Kemandirian Fiskal Dan Rumus Derajat Desentralisasi Fiskal.	Provinsi Maluku selama periode 2018–2022 masih ditandai oleh dominasi sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat. Berbagai indikator keuangan memperlihatkan bahwa kemampuan daerah dalam menopang kebutuhannya sendiri belum mencapai tingkat yang kuat. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menghasilkan struktur pembiayaan yang mandiri. Dalam konteks tersebut, peningkatan PAD diposisikan sebagai agenda yang sangat penting karena menjadi salah satu jalur utama untuk memperluas kapasitas fiskal daerah

				dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana eksternal.
4.	Meilina Dwi Pangesti. 2022. Analisis Flypaper Effect Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020.	Variabel Independen: Analisis Flypaper Effect Dan Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Fiskal	Analisis Regresi Data Panel	PAD dan DAU berkaitan dengan peningkatan belanja daerah, sedangkan DAK memperlihatkan arah yang berlawanan. DBH tidak memperlihatkan keterkaitan yang berarti terhadap belanja daerah. Selain itu, fenomena flypaper effect ditemukan pada sebagian besar daerah yang diamati, menggambarkan kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap penerimaan yang dihimpun dari wilayahnya sendiri. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa struktur penerimaan daerah masih menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku fiskal pemerintah daerah.
5.	Angrine Laodini, Ita Pingkan F. Rorong, Steeva Y.L Tumangkeng. 2023. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Dan Belanja Modal Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Data Panel	Kajian yang dilakukan pada Provinsi Sulawesi Utara memperlihatkan pola yang tidak selalu sejalan dengan asumsi umum mengenai peranan penerimaan daerah terhadap aktivitas perekonomian. Kenaikan PAD ternyata tidak diikuti oleh pergerakan ekonomi yang lebih kuat. Bahkan arah keterkaitan yang terbentuk bergerak berlawanan, sehingga peningkatan kapasitas penerimaan daerah belum otomatis bertransformasi menjadi dorongan produktif bagi aktivitas ekonomi regional. Situasi serupa juga tampak pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Walaupun arahnya bergerak positif,

	Di Sulawesi Utara Periode 2010 – 2021.			keberadaannya belum cukup kuat untuk membentuk perubahan ekonomi yang berarti. Fenomena yang lebih menarik justru muncul pada komponen belanja modal. Alokasi yang diarahkan pada pembangunan aset dan infrastruktur ternyata berkorelasi secara terbalik dengan perkembangan ekonomi daerah, sehingga perlu dicermati bahwa peningkatan pengeluaran investasi pemerintah tidak selalu menghasilkan efek ekonomi yang langsung terlihat dalam periode yang sama.
6.	Dian Novianti, Jauzar Farauq Ishaq. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung.	Variabel Independent : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Dependent: Kemandirian Keuangan	Kuantitatif Deskriptif	Kajian yang berfokus pada pelaku UMKM di Jakarta Barat menggambarkan bahwa kepatuhan perpajakan tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang akademik seseorang. Faktor yang lebih dominan justru terletak pada pemahaman mengenai aturan perpajakan serta tingkat kesadaran individu terhadap kewajiban fiskalnya. Ketika pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme perpajakan dan menyadari pentingnya kontribusi pajak terhadap pembiayaan negara, kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, tingkat pendidikan formal tidak secara otomatis membentuk perilaku kepatuhan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki pendidikan tinggi belum tentu lebih patuh dibandingkan individu lain apabila pemahaman dan kesadaran

				perpajakannya tidak berkembang secara memadai.
7.	Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, Nurliana Mufida. 2020. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.	Variabel Independent : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Variabel Dependent : Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Linier Berganda	Pada Kabupaten Sidoarjo selama rentang 2010–2018, kapasitas keuangan daerah terlihat lebih banyak ditopang oleh kemampuan menghasilkan penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri. PAD berperan sebagai motor utama yang memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut berbeda dengan dana perimbangan yang justru memperlihatkan kecenderungan berlawanan. Semakin besar proporsi dana perimbangan dalam struktur penerimaan, semakin terbatas ruang bagi pemerintah daerah untuk berdiri secara mandiri dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan. Gambaran tersebut mengisyaratkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap sumber pendanaan eksternal dapat memperlambat proses penguatan kapasitas fiskal lokal, sedangkan pengembangan sumber penerimaan internal menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi keberlanjutan keuangan daerah.
8.	Chikita Mamonto, Tri Oldy Rotinsulu, Krest D. Tolosang. 2023. Pengaruh alokasi dana desa dan pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di	Variabel Independent : Alokasi dana desa dan pertumbuhan Ekonomi Variabel Dependent :	Kuantitatif Deskriptif	Kajian mengenai Alokasi Dana Desa dan kondisi kemiskinan memperlihatkan bahwa penyaluran anggaran ke tingkat desa tidak secara otomatis berkorelasi dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Fenomena yang sama juga terlihat pada perkembangan ekonomi wilayah yang belum mampu menghadirkan perubahan berarti terhadap kondisi

	Kabupaten/kota bolaang mongondow raya Tahun 2015-2018	Tingkat kemiskinan		kemiskinan ketika diamati secara terpisah. Bahkan ketika kedua aspek tersebut dipertimbangkan secara bersamaan, dampak yang muncul tetap belum cukup kuat untuk menggambarkan perubahan yang nyata. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan memiliki karakter yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui peningkatan alokasi dana maupun pertumbuhan aktivitas ekonomi semata.
9.	Meri Marya, Edi Ariyanto, Hefrizal Handra. 2024. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di provinsi sumatera barat.	Variabel Independent : desentralisasi fiskal Variabel Dependent : Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan	Kuantitatif Deskriptif	Kajian mengenai desentralisasi fiskal memperlihatkan bahwa pelimpahan kewenangan keuangan kepada daerah berkaitan dengan perbaikan aktivitas ekonomi serta perubahan kondisi sosial masyarakat. Ketika daerah memperoleh ruang yang lebih luas dalam mengelola sumber dayanya, aktivitas ekonomi cenderung bergerak lebih dinamis. Menariknya, desentralisasi fiskal juga berkaitan dengan perubahan kondisi kemiskinan, baik melalui jalur langsung maupun melalui perantara aktivitas ekonomi daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkorelasi kuat terhadap penurunan kemiskinan, keberadaan desentralisasi fiskal tetap memainkan peran penting dalam membentuk kapasitas daerah untuk menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
10.	Suebah, Iba Gunawan.	Variabel Independent :	Kuantitatif Deskriptif	Kajian pada Kota Serang memperlihatkan bahwa PAD menempati posisi yang sangat

	Pengaruh pendapatan asli daerah (pad) terhadap pertumbuhan ekonomi di kota serang	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Dependent : Pertumbuhan ekonomi		dominan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi wilayah. Besarnya kontribusi PAD terhadap perubahan kondisi ekonomi memperlihatkan bahwa kapasitas daerah dalam menghimpun penerimaan lokal memiliki arti yang jauh lebih luas daripada sekadar sumber pendapatan pemerintah. PAD dapat menjadi indikator kemampuan daerah dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, memperluas basis usaha, dan mengoptimalkan berbagai potensi yang tersedia. Dominasi kontribusi PAD yang sangat tinggi mengisyaratkan bahwa perubahan ekonomi daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sumber penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri.
--	---	--	--	--

Sumber: Penelitian terdahulu yang diolah (2025)

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Konsep Fiscal Federalism berkembang melalui kontribusi pemikiran Hayek (1945), Musgrave (1959), Oates (1972), dan Tsalits (2017) dalam (Marya & Handra, 2024). Gagasan dasarnya bertolak dari pandangan bahwa pengelolaan urusan publik akan berjalan lebih efektif apabila tidak seluruh kewenangan terkonsentrasi pada pemerintah pusat. Sebagian fungsi pemerintahan dapat didistribusikan kepada tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga kebutuhan lokal dapat direspons secara lebih cepat dan tepat. Dalam perkembangannya, konsep ini menjadi salah satu fondasi penting dalam pembahasan mengenai desentralisasi fiskal, distribusi kewenangan, serta pembagian tanggung jawab keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori ini terbagi dalam dua perspektif yaitu:

1. Salah satu cabang pemikiran dalam Fiscal Federalism dikenal sebagai *first generation theory*. Kelompok pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh gagasan Hayek (1945) yang menekankan pentingnya informasi lokal dalam proses penyediaan layanan publik. Pemerintah daerah dipandang memiliki pemahaman yang lebih rinci mengenai kebutuhan masyarakat di wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat. Dengan informasi yang lebih dekat terhadap kondisi lapangan, keputusan mengenai penyediaan barang publik, pembangunan infrastruktur, maupun pelayanan masyarakat diyakini dapat dilakukan secara lebih efisien. Dalam perspektif ini, kedekatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Perkembangan berikutnya melahirkan kelompok pemikiran yang dikenal sebagai *second generation theories*. Perspektif yang banyak dikaitkan dengan Musgrave (1959) dan Oates (1972) dalam (Hermalingga et al., 2017) tidak lagi hanya menyoroti persoalan efisiensi alokasi, tetapi juga perilaku pemerintah daerah setelah memperoleh kewenangan yang lebih luas. Fokus utamanya bergeser pada bagaimana aktor pemerintahan merespons insentif fiskal, mengelola anggaran, serta mengambil keputusan ketika memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya.

Ilyas, (2019) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kapasitas pemerintah dalam menjalankan berbagai fungsi ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh aktivitas pasar, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, aktivitas pemerintahan dipetakan ke dalam tiga kelompok fungsi utama yang saling melengkapi satu sama lain.

1. Salah satu fungsi utama pemerintah dalam perspektif Fiscal Federalism adalah fungsi alokasi. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya publik didistribusikan ke berbagai sektor agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran pada berbagai kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya. Melalui mekanisme tersebut, sumber daya yang tersedia dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai manfaat tinggi bagi masyarakat luas. Dengan demikian, fungsi alokasi tidak hanya berbicara mengenai pembelanjaan anggaran, tetapi juga mengenai efektivitas penggunaan sumber daya publik dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Fungsi distribusi berfokus pada upaya menciptakan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Melalui berbagai instrumen fiskal, pemerintah berusaha mengurangi ketimpangan yang muncul akibat perbedaan kepemilikan sumber daya maupun akses terhadap peluang ekonomi. Aktivitas tersebut mencakup berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan distribusi pendapatan sehingga manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
3. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga kondisi ekonomi agar tetap berada dalam situasi yang terkendali. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan instrumen anggaran untuk merespons berbagai gejolak ekonomi, termasuk persoalan pengangguran, inflasi, maupun perlambatan aktivitas ekonomi. Melalui fungsi ini, anggaran negara berperan sebagai instrumen yang membantu menciptakan kestabilan serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Agustina et al., (2022) menjelaskan bahwa desentralisasi juga dapat dipahami sebagai mekanisme pemindahan kapasitas keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui proses tersebut, daerah

memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengatur penggunaan sumber daya fiskalnya sendiri. Kehadiran kewenangan yang lebih besar tersebut bukan sekadar perpindahan administrasi, melainkan juga pemberian tanggung jawab untuk mengelola pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah membawa konsekuensi berupa meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, *Agency Theory* menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjelaskan relasi tersebut. (Sutisna et al., 2024) menjelaskan bahwa teori ini menggambarkan kondisi ketika suatu pihak memberikan mandat kepada pihak lain untuk menjalankan tugas tertentu atas nama pemberi mandat. Dalam tata kelola pemerintahan, masyarakat bersama pemerintah pusat dapat diposisikan sebagai pihak pemberi amanah (principal), sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai penerima amanah (agent). Konsekuensinya, setiap kewenangan yang diterima harus disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas atas seluruh keputusan, kebijakan, dan pemanfaatan sumber daya publik. Dengan kata lain, semakin luas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, semakin besar pula tuntutan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.2.1 Teori Keadilan Fiskal

Keadilan fiskal merupakan pondasi penting dalam sistem keuangan negara modern, yang merupakan prinsip krusial dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Secara sederhana, keadilan fiskal berarti pembagian beban dan manfaat dari kebijakan pemerintah dilakukan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab, baik melalui pajak maupun belanja negara (Saragih et al., 2025). Tujuan utamanya adalah agar setiap warga negara memperoleh hak dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Dalam konteks ini, peran pemerintah bukan hanya sebagai penarik pajak, tetapi juga

sebagai penyalur manfaat kepada mereka yang paling membutuhkan. Menurut Mubila, (2022) terdapat dua prinsip penting yang menjadi pilar dari keadilan fiskal:

- 1 Keadilan horizontal: Mereka yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan beban fiskal yang setara. Artinya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap dua orang dengan pendapatan yang sama hanya karena perbedaan profesi atau wilayah tempat tinggal.
- 2 Keadilan vertikal: Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi harus berkontribusi lebih banyak kepada negara, baik melalui pajak yang lebih tinggi maupun pengurangan manfaat dari program subsidi.

Lebih dari sekadar prinsip ekonomi, keadilan fiskal juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bernegara, bahwa negara harus hadir sebagai penyeimbang agar ketimpangan tidak semakin melebar menurut pendapat dari (Saragih et al., 2025)

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Dari perkembangan kegiatan ekonomi yang berlangsung pada suatu wilayah, tergambarkan kemampuan daerah dalam membentuk sumber pendanaan melalui PAD. Unsur tersebut tersusun atas beragam pemasukan yang lahir melalui perangkat berlandaskan legitimasi yuridis baik pada regulasi lokal maupun aturan nasional. Pasal 31 UU No. 12 2019 mengenai Keuangan Daerah mengklasifikasikan PAD ke dalam himpunan pemasukan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, beserta kelompok penerimaan legal lainnya. Pada sudut pandang fiskal, fungsi PAD tidak terbatas sebagai penyedia kas pemerintah daerah, melainkan sekaligus merepresentasikan kecakapan wilayah dalam mentransformasikan potensi ekonomi setempat menjadi daya dukung pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.

Terhadap keseluruhan pendapatan yang berhasil dikumpulkan pemerintah daerah, tersedia suatu ukuran untuk mengetahui kadar peranan masing-masing sumber pemasukan. Istilah yang dilekatkan pada ukuran tersebut ialah kontribusi. Dalam ranah retribusi daerah, kontribusi merefleksikan bagian penerimaan yang bersumber dari pembayaran layanan publik ataupun pemberian perizinan tertentu yang difasilitasi pemerintah daerah. Posisi retribusi tergolong penting karena menjadi salah satu unsur penyusun PAD (Adolph, 2024) menerangkan bahwa nilai kontribusi retribusi daerah dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan retribusi dengan realisasi PAD pada kurun identik. Lewat ukuran demikian dapat dipetakan seberapa jauh sektor retribusi mengambil bagian dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Bagi individu maupun badan usaha yang memenuhi ketentuan tertentu, pajak daerah hadir sebagai instrumen fiskal wajib dengan daya ikat hukum yang kuat. Ciri utama pajak daerah terletak pada tidak tersedianya imbal jasa langsung kepada pihak pembayar ketika kewajiban tersebut ditunaikan. Selanjutnya, dana yang terakumulasi dialirkan ke dalam sistem pembiayaan daerah guna menopang penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta beragam program yang diarahkan bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah karena keberadaannya berkaitan langsung dengan layanan atau izin tertentu yang diterima pihak yang melakukan pembayaran. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan yang lebih jelas antara pembayaran yang dilakukan dan manfaat yang diperoleh. Pengelolaan retribusi yang efektif dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah karena menciptakan tambahan penerimaan yang bersumber dari aktivitas pelayanan publik. Dana yang

berasal dari retribusi selanjutnya dapat dialirkan kembali ke berbagai program pembangunan, baik yang bersifat fisik seperti infrastruktur maupun program nonfisik yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Aktivitas pemerintah daerah sebagai pemilik modal ataupun aset yang ditempatkan pada berbagai entitas usaha menjadi sumber bagi kelompok penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ruang lingkupnya mencakup beraneka kegiatan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, sampai penyesuaian status hukum atas aset terkait. Dari perspektif keuangan, pemasukan yang lahir umumnya berbentuk dividen, bagian laba, ataupun manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD maupun badan usaha lain yang memiliki keterhubungan kepemilikan dengan pemerintah.

4. Lain-lain PAD yang sah

Sebagai wadah bagi beragam penerimaan yang tidak dapat dikategorikan ke kelompok pajak, retribusi, ataupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, digunakan kategori “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”. Landasan legal bagi kelompok pemasukan tersebut diberikan oleh UU No. 23 2014. Ruang cakupnya melibatkan berbagai sumber seperti pelepasan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, jasa giro, penerimaan kembali atas pengeluaran tertentu, pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sampai aneka penerimaan lain yang memperoleh pengesahan hukum. Eksistensi kelompok ini mengindikasikan bahwa konstruksi PAD tidak semata bertopang pada instrumen konvensional, melainkan turut memuat beragam sumber pemasukan yang lahir dari aktivitas administratif maupun tata kelola aset daerah.

2.2.2 Transfer Ke Daerah

Dalam tata keuangan pemerintahan Indonesia, distribusi sumber daya fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah difasilitasi melalui instrumen TKD. Bentuk yang paling umum dikenal ialah DAU dan DAK. Penyusunan DAU memakai formula yang memperhitungkan kebutuhan serta kapasitas fiskal masing-masing daerah sehingga berfungsi sebagai sarana pemerataan kemampuan keuangan antarwilayah. Berbeda dengan itu, DAK ditujukan pada aktivitas tertentu yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional, seperti pembangunan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan infrastruktur, serta sektor strategis lainnya yang membutuhkan dukungan pendanaan khusus.

Sejak dimulainya era desentralisasi fiskal, perkembangan Transfer Ke Daerah di Indonesia memperlihatkan lonjakan dalam skala yang sangat besar. Dibandingkan masa sebelumnya, alokasi transfer menuju daerah pada awal dekade 2000-an mengalami eskalasi yang amat tajam. Tren tersebut terus berlanjut hingga mencapai ratusan triliun rupiah pada dekade berikutnya. Pada tahun 2024, total TKD ke Daerah tercatat mencapai Rp857,57 triliun. Nilai alokasi tersebut merefleksikan komitmen pemerintah pusat untuk memperkecil ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah sekaligus mereduksi kesenjangan antara level pemerintahan pusat dan daerah. Melalui mekanisme demikian, daerah dengan keterbatasan kemampuan keuangan tetap memperoleh dukungan guna menjalankan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik.

Bagi kapasitas fiskal daerah, keberadaan Transfer Ke Daerah menghadirkan konsekuensi yang tidak selalu identik. Pada satu sisi, transfer fiskal menyediakan ruang pendanaan yang sangat krusial bagi wilayah yang belum mempunyai fondasi penerimaan lokal yang kokoh. Melalui dukungan tersebut, program pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat dijalankan pemerintah daerah. Akan tetapi, pada sisi berbeda, ketergantungan berlebihan terhadap transfer berpotensi mereduksi dorongan

kelembagaan untuk memperluas basis PAD. Ketika situasi demikian berlangsung dalam rentang panjang, perhatian pemerintah daerah dapat lebih terarah pada penantian alokasi pusat dibandingkan pengembangan strategi penguatan kapasitas fiskal internal. Oleh karena itu, rancangan transfer fiskal membutuhkan keseimbangan antara fungsi pemerataan dan orientasi menuju kemandirian.

Kebijakan transfer fiskal di Indonesia terus mengalami penyesuaian seiring perubahan kebutuhan pembangunan nasional maupun dinamika daerah. Berbagai penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan akurasi alokasi, memperkuat transparansi, serta memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah agar tidak menjadikan transfer sebagai sumber pembiayaan yang dominan. Dorongan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mengarahkan daerah untuk memperluas basis penerimaan lokal, meningkatkan kualitas pengelolaan pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

2.2.3 Kemandirian Fiskal

Sebagai gambaran mengenai kecakapan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahannya melalui sumber daya yang berada di bawah kendalinya sendiri, kemandirian fiskal dapat dimaknai. Konsep tersebut lazim dimanfaatkan guna menelaah derajat ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Makin tinggi kemampuan daerah dalam mendanai aktivitas pemerintahan melalui penerimaan internal, makin luas pula ruang diskresi yang tersedia untuk menetapkan arah pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya. Perspektif LHP BPK RI atas LKPP 2020 menempatkan kemandirian fiskal sebagai refleksi kecakapan daerah dalam mengelola kewenangan fiskal yang dimiliki, baik melalui optimalisasi penerimaan maupun penataan prioritas belanja.

Dalam kerangka otonomi daerah, keberhasilan implementasi desentralisasi kerap dinilai melalui indikator berupa kemandirian fiskal. Daerah dengan fondasi fiskal yang kuat umumnya memiliki keleluasaan lebih besar dalam menetapkan prioritas pembangunan, merancang program pelayanan, serta mendistribusikan sumber daya tanpa tekanan berlebihan dari keterbatasan pendanaan eksternal. Sebaliknya, wilayah yang sangat bertumpu pada transfer pusat memiliki ruang kebijakan yang relatif terbatas. Pada konteks tersebut, Transfer Ke Daerah tetap memegang fungsi penting sebagai sarana pemerataan, khususnya bagi daerah yang menghadapi keterbatasan sumber penerimaan lokal. Meski demikian, keberadaannya idealnya berfungsi sebagai penunjang, bukan tumpuan utama seluruh aktivitas pemda.

Untuk menggambarkan derajat kemandirian fiskal, salah satu ukuran yang paling sering dipakai ialah rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Melalui rasio tersebut dapat dipahami seberapa besar kecakapan daerah dalam menghasilkan sumber pembiayaan dari wilayahnya sendiri. Ketika dominasi PAD semakin tinggi, kapasitas fiskal daerah dipandang semakin kokoh karena ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal menjadi lebih rendah. Literatur keuangan daerah secara umum menempatkan penguatan PAD sebagai agenda strategis dalam mempertebal fondasi fiskal jangka panjang. Semakin optimal pemanfaatan sumber ekonomi lokal oleh daerah, semakin terbuka pula peluang untuk membangun sistem pembiayaan yang berkelanjutan.

Transfer Ke Daerah seperti DAU dan DAK tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur fiskal nasional karena berfungsi menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah yang belum memiliki kapasitas fiskal memadai. Akan tetapi, dominasi transfer dalam struktur pendapatan daerah dapat menimbulkan konsekuensi yang kurang menguntungkan apabila berlangsung secara terus-menerus. Ketika kebutuhan pembiayaan sebagian besar dipenuhi oleh dana dari luar daerah, motivasi untuk memperluas basis pajak, meningkatkan efektivitas retribusi, atau

mengembangkan sumber penerimaan alternatif berpotensi melemah. Oleh sebab itu, perimbangan keuangan pusat-daerah perlu dirancang sedemikian rupa sehingga tetap menjamin pemerataan tanpa menghambat proses penguatan kapasitas fiskal lokal.

Beragam tantangan masih menghadang upaya penguatan kemandirian fiskal di Indonesia. Ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah, lemahnya administrasi perpajakan daerah, serta keterbatasan SDM menjadi hambatan yang memerlukan penanganan. Di samping itu, kondisi ekonomi lokal, struktur demografi, dan kebijakan pemerintah pusat turut berperan dalam mengondisikan derajat kemandirian fiskal suatu daerah. Berbagai riset mutakhir terus menelaah unsur-unsur tersebut guna menghadirkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna.

Penguatan kemandirian fiskal menuntut pemerintah daerah menginisiasi beragam langkah, di antaranya meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, memperluas sumber PAD baru, mengelola aset daerah secara produktif, serta memperbaiki mutu pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan penerimaan. Reformasi kebijakan fiskal yang menyeluruh, meliputi penguatan kapasitas fiskal, penyempurnaan regulasi, dan peneguhan mekanisme pengawasan, turut dibutuhkan agar tercipta lingkungan yang mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah di Indonesia.

2.3 Integrasi Keislaman

Dalam perspektif Islam, akuntansi publik tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan, melainkan juga berkaitan dengan dimensi amanah, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Kerangka tersebut dapat ditelusuri melalui konsep imam dan ummat yang berasal dari akar kata *amma-yaummu*. Makna yang terkandung di dalamnya tidak sekadar mengarah pada kepemimpinan formal, tetapi juga pada keberadaan figur yang menjadi rujukan, penuntun, dan pusat orientasi moral. Pada konstruksi ini, ummat berada pada posisi pihak yang mengikuti arah tujuan bersama, sedangkan imam memegang tanggung jawab

sebagai penuntun yang wajib menjaga integritas dan keteladanan. Dengan demikian, akuntabilitas publik dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan pelaporan kepada manusia, tetapi juga melekat pada tanggung jawab moral yang lebih luas. Korelasi antara konsep imam dan ummat tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut melalui beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar normatif bagi pembahasan tersebut.

Surat Al – Isra' (17) ayat 71 (NU Online., n.d.-c)

يَوْمَ نَدْعُوهُ أَكُلُّ أَنْاسٍ بِإِمَامِهِمْ

Maknanya ialah: “(Ingatlah), pada saat setiap umat dipanggil oleh Kami bersama pemimpin yang mengiringinya;”

Surat Al – Anbiya' (21) ayat 73 (NU Online., n.d.-b)

يَهْدُوهُنَّ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَجَعَلْنَاهُنَّ آيَةً

Maknanya ialah: “Lalu Kami menetapkan mereka sebagai para pemimpin yang menghadirkan petunjuk melalui perintah Kami, serta Kami sampaikan wahyu kepada mereka agar melaksanakan kebajikan,”

Surat Al – Qashas (28) ayat 41 (NU Online., n.d.-a)

النَّارَ إِلَىٰ نَارٍ يَدْعُوهُنَّ آيَةً جَعَلْنَاهُنَّ

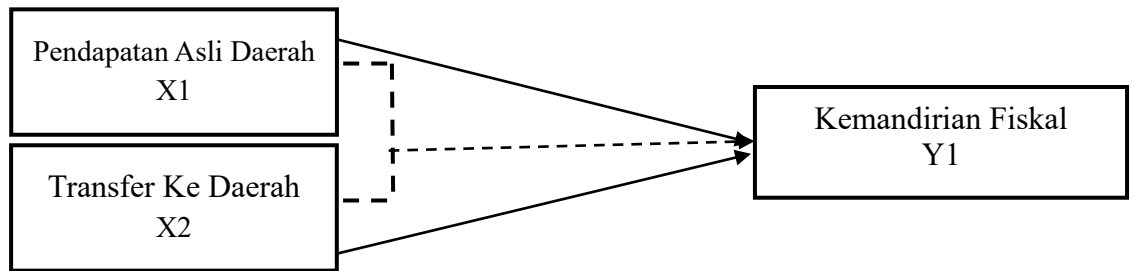
Maknanya ialah: “Dan Kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka”

Ketiga ayat tersebut menyiratkan pesan moral mengenai peran sentral seorang pemimpin (*imam*) terhadap masyarakat (*ummat*), baik dalam dimensi hubungan harmonis, kualitas kepemimpinan, maupun konsekuensi atas tindakan yang diambil. Secara logis, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah menjadi penentu arah masa depan daerah tersebut. Kebijakan yang efektif akan mendorong kemandirian keuangan yang kokoh, sedangkan kebijakan yang kurang tepat akan menghambat potensi kemandirian daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah pada

hakikatnya adalah perwujudan dari arah kebijakan pemimpin dalam mewujudkan tata kelola yang amanah dan mandiri.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Konseptual



Keterangan:

- ▶ : Berpengaruh secara parsial
- - - - -▶ : Berpengaruh secara simultan

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berpengaruh terhadap kemandirian fiskal

Ketergantungan dominan terhadap arus dana dari luar wilayah umumnya dipakai untuk membedakan daerah dengan kapasitas pembiayaan lemah dari daerah yang mampu membiayai dirinya sendiri. Dalam konteks tersebut, PAD kerap dipandang sebagai representasi daya suatu wilayah dalam menghasilkan pendanaan melalui aktivitas ekonomi internal. Keberadaannya tidak berhenti sebagai angka yang tercantum pada dokumen anggaran, melainkan merefleksikan kecakapan kelembagaan pemerintah daerah dalam memetakan, mengelola, serta mentransformasikan potensi ekonomi menjadi penerimaan yang dapat menopang fungsi pemerintahan. Debora et al., (2023) mengemukakan bahwa pada Sulawesi Utara, keterkaitan yang erat tampak antara PAD dan derajat kemandirian keuangan daerah. Pandangan serupa diutarakan Wasil et al., (2020) mengemukakan bahwa pada Sulawesi Utara, keterkaitan yang erat tampak antara PAD dan derajat kemandirian keuangan daerah. Pandangan serupa diutarakan

(Nurkhayati, 2022) menyoroti bahwa kapasitas PAD di berbagai wilayah masih terhambat oleh kendala kelembagaan, struktur ekonomi lokal yang belum berkembang optimal, serta belum maksimalnya eksploitasi sumber penerimaan yang tersedia. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa kekuatan fiskal daerah tidak semata ditentukan oleh keberadaan sumber pendapatan, tetapi juga oleh mutu tata kelola yang menaunginya.

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal.

2.5.2 Transfer Ke Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berpengaruh terhadap kemandirian fiskal

Transfer Ke Daerah merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kapasitas keuangan antarwilayah sekaligus memastikan bahwa setiap daerah memiliki ruang yang memadai untuk menyelenggarakan layanan publik. Akan tetapi, keberadaan TKD sering kali menghadirkan dinamika yang berbeda pada setiap daerah. Debora et al., (2023) menjelaskan bahwa semakin dominan posisi transfer dalam struktur pendapatan daerah, semakin kecil ruang kemandirian yang dapat dibangun secara internal. Sementara itu, Laodini et al., (2023) mengemukakan bahwa transfer pemerintah pusat memperlihatkan arah keterkaitan yang positif terhadap aktivitas ekonomi daerah, meskipun kekuatan keterkaitannya belum cukup besar untuk menghasilkan konsekuensi statistik yang kuat. Di sisi lain, (Liline & Khaeril, 2024) menggarisbawahi pentingnya memperbesar kapasitas PAD sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari luar daerah. Dalam konteks tersebut, TKD dapat dipandang sebagai instrumen yang memiliki dua sisi sekaligus: di satu sisi berfungsi sebagai penyangga fiskal, sementara di sisi lain berpotensi menciptakan pola ketergantungan apabila tidak diimbangi dengan penguatan sumber penerimaan lokal.

H2: Transfer Ke Daerah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.

2.5.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah(TKD) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal

Berbagai kajian terdahulu memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan PAD dan TKD sebagai dua komponen utama dalam struktur pendapatan daerah. Wasil et al., (2020) menguraikan bahwa kombinasi kedua komponen tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Debora et al., (2023) juga mengemukakan bahwa PAD dan transfer fiskal secara bersama-sama berkontribusi terhadap pembentukan kapasitas keuangan daerah dengan tingkat penjelasan yang sangat tinggi. Temuan lain yang dikemukakan oleh Liline & Khaeril, (2024) memperlihatkan bahwa PAD dan transfer ke daerah secara kolektif berkaitan dengan kondisi kemandirian fiskal Provinsi Maluku meskipun tingkat kemandiriannya masih berada pada kategori yang belum optimal. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa kekuatan fiskal daerah tidak lahir hanya dari besarnya penerimaan lokal ataupun transfer semata, melainkan terbentuk melalui interaksi antara kemampuan menghasilkan pendapatan internal dan kemampuan mengelola dukungan fiskal yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedua komponen tersebut menjadi penting untuk memahami konfigurasi fiskal kabupaten dan kota di Jawa Timur selama rentang waktu 2019–2023.

H3: Pendapatan asli daerah dan Transfer Ke Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian Fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pemanfaatan informasi berbentuk angka (kuantitatif) menjadi landasan utama dalam penyusunan kajian ini guna menjawab persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya. Perhatian utamanya diarahkan pada penelusuran pola keterkaitan yang muncul di antara PAD, TKD, serta derajat kemandirian fiskal daerah. Seluruh informasi yang dimanfaatkan bersumber dari dokumen realisasi APBD pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur sepanjang rentang 2019–2023 yang tersedia pada DJPK. Penggunaan data numerik tersebut membuka peluang untuk membaca dinamika fiskal daerah secara lebih terstruktur, sehingga posisi PAD dan TKD dalam pembentukan kapasitas keuangan pemerintah daerah dapat dipahami dengan lebih terang.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 daerah selama periode 2019–2023. Dengan demikian, jumlah observasi yang seharusnya diperoleh adalah 190 observasi ($38 \text{ kabupaten/kota} \times 5 \text{ tahun}$). Namun, dalam proses pengumpulan dan pengolahan data terdapat 1 observasi yang mengalami *missing value* sehingga tidak dapat digunakan dalam analisis. Oleh karena itu, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 189 observasi. Seluruh informasi diperoleh melalui dokumen realisasi APBD yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama periode 2019–2023.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dipilih untuk mewakili populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh

(sensus), yaitu teknik penentuan sampel dengan menjadikan seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pemilihan objek pengamatan dilakukan secara sengaja (*purposive*) melalui pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan. Pendekatan ini dipilih karena tidak seluruh daerah memiliki karakteristik yang relevan untuk menggambarkan variasi kemampuan fiskal secara ekstrem. Dengan memilih daerah yang memenuhi persyaratan tertentu, pembahasan dapat lebih terfokus pada perbedaan kapasitas PAD dan TKD yang muncul di berbagai wilayah Jawa Timur. Strategi tersebut juga memungkinkan penyusunan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perbedaan karakteristik fiskal memunculkan tingkat kemandirian yang berbeda-beda. Adapun kriteria pemilihan sampel tersebut meliputi:

1. Ketersediaan informasi secara berkelanjutan menjadi syarat awal dalam penentuan daerah yang dimasukkan ke dalam pembahasan. Wilayah yang dipilih wajib mempunyai catatan PAD, TKD, serta indikator kemandirian fiskal yang tercatat tanpa jeda selama periode 2019–2023. Keseluruhan informasi tersebut bersumber dari laporan APBD resmi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga memiliki tingkat keterandalan yang memadai untuk dimanfaatkan dalam pembahasan.
2. Persyaratan berikutnya berkaitan dengan representasi kelompok PAD tertinggi dan kelompok PAD terendah. Kehadiran dua kelompok tersebut memungkinkan pembacaan yang lebih kontras mengenai perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah. Daerah dengan PAD tinggi umumnya memiliki basis ekonomi yang lebih kuat, sedangkan daerah dengan PAD rendah sering menghadapi keterbatasan sumber penerimaan lokal yang berdampak pada kemampuan pembiayaan pemerintahannya.
3. Selain mempertimbangkan posisi PAD, pemilihan daerah juga

memperhatikan variasi besaran Transfer Ke Daerah yang diterima. Daerah dengan transfer fiskal sangat tinggi dan sangat rendah dimasukkan agar perbedaan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat terlihat secara lebih jelas. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada kemampuan menghasilkan pendapatan lokal, tetapi juga memperhatikan bagaimana dukungan fiskal eksternal membentuk struktur keuangan daerah.

4. Pertimbangan lain yang digunakan adalah kestabilan pola fiskal selama periode pengamatan. Daerah yang memperlihatkan fluktuasi ekstrem akibat faktor sementara tidak menjadi prioritas utama. Fokus diarahkan pada daerah yang memperlihatkan pola fiskal relatif konsisten sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi keuangan daerah dalam jangka menengah.

Melalui serangkaian persyaratan tersebut, ditetapkan lima daerah sebagai objek pengamatan utama. Komposisi tersebut terdiri atas lima daerah dengan kapasitas PAD tertinggi di Jawa Timur. Pemilihan ini diharapkan mampu memperlihatkan perbedaan karakteristik fiskal secara lebih tegas sehingga dinamika PAD, transfer fiskal, dan tingkat kemandirian daerah dapat dipahami secara lebih mendalam.

3.4 Data dan Jenis Data

Informasi yang digunakan bersumber dari dokumen resmi pemerintah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Dokumen utama yang dimanfaatkan adalah Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur selama periode 2019–2023 yang tersedia melalui portal Sistem Informasi Keuangan Daerah milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>). Selama periode tersebut, Kota Surabaya secara konsisten menempati posisi teratas dalam perolehan PAD dengan nilai rata-rata yang melampaui Rp5 triliun setiap tahun. Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik berada pada kelompok berikutnya dengan capaian di atas Rp1,5 triliun. Kota Malang dan Kabupaten

Banyuwangi juga termasuk dalam kelompok daerah dengan kemampuan PAD yang relatif tinggi. Pada sisi lain, Kabupaten Sampang, Pacitan, dan Bondowoso berada dalam kelompok dengan perolehan PAD paling rendah. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal yang cukup lebar antara wilayah metropolitan dan industri dibandingkan daerah yang basis ekonominya masih didominasi sektor primer.

Perbedaan profil pendapatan antar-daerah mencerminkan variasi faktor eksternal yang mencakup aspek sosiogeografis, ekonomi, dan lingkungan. Meski memiliki potensi yang besar, efektivitas pengolahan sumber daya tersebut sering terkendala oleh faktor internal maupun eksternal, yaitu terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan, serta regulasi yang cenderung restriktif dalam implementasinya. Di sisi lain data Transfer Ke Daerah Pada periode 2019–2023, TKD terbesar di Jawa Timur diterima oleh kabupaten besar seperti Sumenep, Malang, Jember, Banyuwangi, dan Probolinggo, dengan rata-rata di atas Rp2,5–3 triliun per tahun. Besarnya alokasi ini dipengaruhi oleh jumlah desa yang sangat banyak, luas wilayah, dan kebutuhan layanan publik yang tinggi sehingga komponen Dana Desa, DAU, serta DAK mereka juga besar. Sebaliknya, daerah dengan transfer terkecil adalah kota kecil seperti Mojokerto, Madiun, Blitar, Pasuruan, dan Batu, hanya sekitar Rp600–900 miliar per tahun. Hal ini karena kota umumnya memiliki desa yang sangat sedikit, jumlah penduduk lebih kecil, dan sebagian kebutuhan fiskalnya dapat ditopang dari PAD. Secara rata-rata, transfer ke 38 kabupaten/kota Jawa Timur mencapai sekitar Rp2,4–2,6 triliun per daerah per tahun, namun distribusinya tidak merata sehingga tampak adanya ketimpangan fiskal antara kabupaten pedesaan besar dan kota kecil.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Bebas/Independent (X)

1. Pendapatan asli daerah (X1)

Dalam kajian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipahami sebagai keseluruhan penerimaan yang bersumber dari aktivitas ekonomi yang berada di dalam wilayah administrasi daerah dan dipungut melalui mekanisme yang memperoleh dasar hukum dari peraturan daerah maupun ketentuan nasional. Keberadaan PAD menjadi salah satu instrumen utama yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan prinsip otonomi daerah karena menyediakan ruang pembiayaan yang berasal dari kapasitas wilayah itu sendiri. Melalui PAD, daerah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan fiskal eksternal.

Sebagai fondasi utama pembiayaan yang berasal dari sumber internal, posisi PAD dalam susunan APBD menempati peranan yang sangat penting. Komponen tersebut mencerminkan kecakapan pemerintah daerah dalam mengubah potensi ekonomi menjadi kapasitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak tersebar secara seragam di seluruh wilayah. Sebagian daerah mempunyai basis ekonomi yang mampu menghasilkan penerimaan dalam volume tinggi, sedangkan wilayah lain masih menghadapi keterbatasan sumber ekonomi yang dapat dikonversi menjadi pemasukan fiskal. Ketidaksamaan kapasitas tersebut melahirkan perbedaan kemampuan pembiayaan pembangunan antarwilayah yang pada akhirnya membentuk derajat kemandirian fiskal yang tidak sama.

2. Transfer Ke Daerah (X2)

Transfer Ke Daerah, yang dalam arsitektur keuangan negara kerap ditempatkan dalam rumpun dana perimbangan, merupakan mekanisme redistribusi fiskal yang bersumber dari kas nasional dan dialirkan kepada pemerintah daerah. Kehadirannya tidak semata-mata

berfungsi sebagai tambahan pendapatan, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada daerah tetap dapat dijalankan walaupun kapasitas penerimaan masing-masing wilayah tidak berada pada tingkat yang sama. Melalui skema ini, daerah memperoleh dukungan pendanaan guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan administratif yang menjadi tanggung jawabnya dalam kerangka otonomi daerah.

Salah satu latar belakang utama penyaluran Transfer Ke Daerah adalah adanya perbedaan kemampuan fiskal yang cukup tajam antardaerah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak seluruh wilayah memiliki basis ekonomi, aktivitas usaha, kepadatan penduduk produktif, ataupun kapasitas pemungutan penerimaan yang setara. Pada daerah dengan ruang fiskal terbatas, penerimaan internal sering kali belum cukup untuk membiayai kebutuhan pelayanan dasar dan operasional pemerintahan. Dalam kondisi demikian, TKD berfungsi sebagai bantalan fiskal yang menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menopang pembiayaan rutin, aliran dana tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperluas basis penerimaan lokal, memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, serta mempercepat pembangunan wilayah. Dengan demikian, fungsi transfer tidak berhenti pada distribusi dana semata, tetapi juga diarahkan sebagai katalis bagi penguatan kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

Meskipun transfer fiskal memiliki fungsi strategis, orientasi pembangunan daerah dalam horizon yang lebih panjang tetap diarahkan pada penguatan sumber penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Ketergantungan yang terlalu dominan terhadap alokasi dari pusat berpotensi menciptakan ruang gerak fiskal yang sempit ketika terjadi perubahan kebijakan nasional ataupun penyesuaian anggaran negara. Realitas yang masih banyak ditemui memperlihatkan bahwa

tambahan dana yang diterima daerah sering kali mendorong peningkatan belanja, namun belum selalu diikuti dengan investasi pada sektor-sektor yang mampu memperbesar kapasitas penerimaan lokal pada masa mendatang. Akibatnya, pertumbuhan belanja berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kemampuan fiskal internal daerah.

3.5.2 Variabel Terikat/Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent.

1. Kemandirian fiskal (Y1)

Kemandirian fiskal dapat dipahami sebagai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menopang kebutuhan pembiayaan pemerintahannya dengan mengandalkan kekuatan pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Konsep ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan administrasi tanpa ketergantungan dominan terhadap sumber pendanaan eksternal. Dalam praktik tata kelola keuangan daerah, tingkat kemandirian sering digunakan untuk membaca posisi fiskal suatu wilayah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar kapasitas daerah dalam membiayai kebutuhan publik melalui penerimaan internal, semakin luas pula ruang kebijakan yang dimiliki untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik lokal.

Laporan pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan oleh BPK RI atas LKPP Tahun 2020 memperkenalkan pengelompokan tingkat kemandirian fiskal ke dalam empat strata, yaitu “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri”, dan “Sangat Mandiri”. Klasifikasi tersebut digunakan untuk memetakan posisi fiskal pemerintah daerah secara nasional. Potret yang muncul memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah masih berada pada tingkatan yang belum sepenuhnya kuat dari sisi kapasitas fiskal. Bahkan, belum terdapat pemerintah daerah yang berhasil mencapai kategori tertinggi. Kondisi

tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan internal masih belum menjadi penopang utama struktur pendapatan di banyak wilayah. Salah satu indikasi lemahnya kemandirian fiskal terlihat ketika kontribusi penerimaan asli daerah berada di bawah nilai transfer yang diterima dari pemerintah pusat.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber	Skala Variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)	Penerimaan yang bersumber dari aktivitas ekonomi maupun kekayaan yang berada dalam cakupan kewenangan pemerintah daerah, serta dipungut melalui perangkat hukum daerah dengan tetap merujuk pada ketentuan nasional, termasuk ke dalam kategori ini. Kehadirannya merepresentasikan kecakapan daerah dalam mengoptimalkan potensi fiskal yang tersedia pada wilayahnya sendiri..	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota (2019–2023)	Rasio
Transfer Ke Daerah (X2)	Melalui APBN, dialirkan dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan melalui mekanisme desentralisasi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat pada berbagai tingkatan wilayah.	$\frac{\text{Transfer Ke Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Laporan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten/Kota (2019–2023)	Rasio

Kemandirian Fiskal (Y)	Kemampuan pemda dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui kapasitas pendapatan yang dihasilkan sendiri, tanpa dominasi bantuan finansial dari luar daerah, menjadi gambaran dari konsep ini..	PAD/ Transfer Ke Daerah $\times$ 100%	Laporan Realisasi APBD & Laporan BPK RI (2019–2023)	Rasio
------------------------	---	---------------------------------------	---	-------

3.6 Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai perangkat awal untuk membaca karakteristik data sebelum dilakukan tahapan pengolahan yang lebih lanjut. Teknik ini menyajikan informasi mengenai pusat data, nilai ekstrem, serta tingkat keragaman data melalui ukuran seperti rata-rata, median, nilai tertinggi, nilai terendah, dan simpangan baku. Melalui penyajian tersebut, pola umum data dapat dikenali sejak awal, termasuk kecenderungan distribusi serta tingkat variasi yang dimiliki masing-masing indikator. Pada konteks kajian ini, statistik deskriptif dimanfaatkan untuk memetakan karakteristik PAD, TKD, dan Kemandirian Fiskal selama periode observasi sehingga struktur data dapat dipahami secara lebih menyeluruh sebelum memasuki tahapan estimasi model.

Statistik deskriptif, Menurut Widarjono (2005), ialah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui informasi mengenai nilai terendah, nilai tertinggi, rerata, dan

simpangan baku. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya pemahaman awal mengenai karakteristik data tanpa mengarah pada penarikan kesimpulan sebab-akibat. Dalam kajian ini, statistik deskriptif dimanfaatkan untuk memotret profil fiskal kabupaten dan kota di Jawa Timur sepanjang periode 2019–2023, khususnya yang berkaitan dengan PAD, TKD, dan derajat Kemandirian Fiskal masing-masing wilayah..

3.6.2 Analisis Pemilihan Model

Pada proses estimasi regresi data panel, penetapan model tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena tiap pendekatan memiliki asumsi serta karakteristik yang berlainan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tahapan penyaringan model guna memastikan bentuk estimasi yang dipilih sesuai dengan struktur data yang tersedia. Prosedur tersebut dilaksanakan secara bertingkat melalui perbandingan berbagai alternatif model panel yang lazim digunakan dalam literatur ekonometrika

3.6.2.1 Uji Chow (*Chow test*)

Evaluasi ini digunakan sebagai mekanisme seleksi awal untuk menentukan apakah model dengan intersep yang sama bagi seluruh unit observasi masih layak digunakan atau justru diperlukan intersep yang berbeda pada masing-masing unit. Dalam praktiknya, prosedur ini membandingkan CEM dengan FEM. Keputusan ditentukan melalui evaluasi terhadap nilai statistik yang dihasilkan dari perbandingan kedua model tersebut. Hipotesis yang digunakan pada prosedur ini adalah sebagai berikut:

H0 : Model yang tepat adalah *Common Effect Model* (CEM)

H1 : Model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penentuan keputusan pada Uji Chow dilakukan dengan membandingkan:

1. Ketika probabilitas Cross-section Chi-Square berada di bawah ambang 0,05 atau 5 persen, H_0 tidak dipertahankan. Keadaan tersebut mengarahkan pemilihan kepada FEM sebagai pendekatan yang lebih tepat.
2. Apabila probabilitas Cross-section Chi-Square melampaui batas 0,05 atau 5 persen, H_0 tetap dipertahankan. Dalam situasi demikian, CEM dipandang lebih sesuai untuk diterapkan.

3.6.2.2 Uji Hausman (*Hausman test*)

Sebagai tahapan lanjutan, prosedur ini dimanfaatkan untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM pada estimasi data panel. Cara kerjanya bertumpu pada perbandingan konsistensi estimator yang dihasilkan oleh kedua pendekatan tersebut. Perhatian utamanya diarahkan pada keberadaan keterkaitan antara efek individual yang tidak teramati dengan faktor penjelas yang termuat dalam model. Pada prosedur ini, hipotesis nol menyatakan bahwa pendekatan Random Effect tetap menghasilkan estimator yang konsisten serta layak diterapkan. Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

1. H_0 : Menggunakan random effect model (**REM**)
2. H_1 : Menggunakan fixed effect model (**FEM**)

Kesimpulan dari hasil uji hausman adalah:

- Bila probabilitas Cross-section Random tercatat lebih rendah daripada ambang 0,05, maka hipotesis nol tidak lagi dipertahankan sehingga FEM menjadi pilihan. Sebaliknya, apabila probabilitas tersebut melampaui batas 0,05, maka REM dianggap lebih tepat karena memenuhi persyaratan konsistensi yang diperlukan dalam estimasi data panel.

- Saat probabilitas pada unsur Cross-section Random berada di atas batas 0,05, asumsi dasar yang melekat pada hipotesis nol tetap dipertahankan. Kondisi demikian mengisyaratkan bahwa perbedaan karakteristik antarunit pengamatan tidak memiliki keterkaitan sistematis dengan faktor penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karenanya, REM lebih layak diterapkan karena mampu menghasilkan estimasi yang efisien tanpa memerlukan intersep tersendiri bagi masing-masing unit observasi.

3.6.2.3 Lagrange Multiplier (LM) test

Mekanisme ini difungsikan untuk mengevaluasi apakah keberadaan komponen efek acak benar-benar diperlukan atau justru dapat diabaikan. Tahapan pelaksanaannya diawali dengan membentuk estimasi menggunakan *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Setelah kedua model tersedia, dilakukan evaluasi statistik melalui pendekatan Breusch-Pagan guna mendeteksi apakah variasi individual yang tidak teramati memiliki kontribusi yang cukup berarti dalam model. Dengan kata lain, LM Test bertindak sebagai instrumen untuk menentukan apakah struktur data lebih tepat diperlakukan sebagai kumpulan observasi biasa atau memerlukan komponen efek acak. Dalam uji ini, hipotesis yang diuji adalah:

1. H_0 : Menggunakan *Common Effect Model* (CEM)
2. H_1 : Menggunakan *Random Effect Model* (REM)

Interpretasi akhir dari prosedur Lagrange Multiplier berpusat pada:

- 1) Ketika probabilitas pada statistik Cross-section Breusch-Pagan berada di bawah nilai 0,05, asumsi dasar yang menyatakan tidak adanya efek acak tidak lagi dipertahankan. Situasi ini mengindikasikan bahwa variasi spesifik antarunit observasi memiliki peranan yang cukup penting dalam

menjelaskan fenomena yang diamati. Oleh sebab itu, REM menjadi alternatif yang lebih tepat untuk digunakan pada tahapan estimasi berikutnya.

- 2) Sebaliknya, apabila probabilitas Cross-section Breusch-Pagan melampaui ambang 0,05, maka keberadaan efek acak tidak memperoleh dukungan statistik yang memadai. Dalam kondisi demikian, penggunaan CEM dianggap sudah cukup untuk merepresentasikan struktur data tanpa perlu menambahkan komponen variasi individual yang bersifat acak.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Normalitas residual menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses evaluasi model karena berkaitan dengan validitas berbagai prosedur statistik lanjutan. Residual yang menyebar secara normal mencerminkan bahwa penyimpangan antara nilai aktual dan nilai prediksi tidak membentuk pola yang menyimpang secara ekstrem. Widarjono, (2005) menjelaskan bahwa kualitas inferensi statistik sangat dipengaruhi oleh karakteristik residual yang digunakan. Untuk memeriksa kondisi tersebut, kajian ini memanfaatkan pendekatan Jarque-Bera (JB) yang bekerja dengan membandingkan tingkat kemencengan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) distribusi residual terhadap distribusi normal teoritis.

- H_0 : Residual berdistribusi normal
- H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Penentuan keputusan pada pengujian Jarque-Bera dilakukan melalui evaluasi nilai probabilitas yang dihasilkan. Ketika nilai probabilitas melebihi 0,05, residual dianggap memiliki pola distribusi yang tidak berbeda secara berarti dari distribusi normal. Sebaliknya, probabilitas yang berada di bawah ambang tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan distribusi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam interpretasi model.

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Keberadaan keterkaitan yang terlalu kuat di antara faktor bebas dalam model perlu ditelusuri melalui pemeriksaan multikolinearitas. Korelasi yang sangat tinggi antarfaktor independen berpotensi menimbulkan ketidakstabilan koefisien estimasi sekaligus menyulitkan pemisahan kontribusi masing-masing faktor. (Widarjono, 2005) menegaskan bahwa kondisi tersebut semestinya tidak muncul pada model yang baik. Dalam pembahasan ini, pendeteksian dilakukan dengan memanfaatkan matriks korelasi antar faktor independen. Gujarati (2012), menerangkan bahwa gejala multikolinearitas berat umumnya mulai tampak ketika nilai korelasi mendekati atau bahkan melampaui kisaran 0,80 sampai 0,90.

- H_0 : Tidak terdeteksi multikolinearitas (Nilai korelasi $< 0,80$)
- H_1 : Terdeteksi multikolinearitas (Nilai korelasi $> 0,80$)

3.6.3.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi berkaitan dengan kemungkinan adanya keterkaitan antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode lainnya. Dalam data yang memiliki dimensi waktu, keberadaan pola residual yang saling berkaitan dapat menyebabkan estimasi kehilangan sebagian sifat statistik yang diharapkan. (Basuki, 2016). menjelaskan bahwa model yang layak digunakan semestinya tidak memperlihatkan pola keterkaitan residual antarperiode. Untuk memeriksa kondisi tersebut, digunakan pendekatan Durbin-Watson (DW) yang membandingkan nilai statistik DW dengan batas bawah (lower bound) dan batas atas (upper bound) yang telah ditentukan

- Keberadaan autokorelasi dapat diindikasikan apabila nilai statistik Durbin-Watson jatuh di bawah batas bawah (dL) ataupun menempati posisi melampaui nilai $(4 - dL)$. Keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa residual antarperiode tidak bergerak secara terpisah satu sama lain. Oleh sebab itu, perhatian tambahan terhadap perumusan spesifikasi model menjadi diperlukan agar estimasi yang dihasilkan tidak mengalami distorsi.

- Tidak ditemukannya pola keterkaitan residual secara sistematis dapat diasumsikan ketika nilai Durbin-Watson berada pada rentang antara batas atas (d_U) dan nilai $(4 - d_U)$. Dalam keadaan demikian, model dipandang terbebas dari persoalan autokorelasi sehingga struktur estimasinya dapat dianggap memadai.
- Suatu area keputusan yang bersifat tidak pasti juga dapat muncul pada interpretasi Durbin-Watson, yakni ketika nilainya terletak di antara d_L dan d_U ataupun berada pada interval $(4 - d_U)$ hingga $(4 - d_L)$. Pada kondisi tersebut, informasi yang tersedia belum cukup kuat untuk memastikan ada atau tidaknya autokorelasi. Karena itu, diperlukan pertimbangan tambahan maupun prosedur pendukung agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang lebih meyakinkan..

3.6.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Evaluasi ini diarahkan untuk mengetahui apakah variasi residual tetap konsisten pada seluruh tingkat observasi atau justru berubah-ubah (Basuki, 2016). menjelaskan bahwa model yang ideal memiliki residual dengan varians yang relatif stabil. Ketidakkonsistenan varians residual dapat menyebabkan estimasi standar error menjadi kurang akurat sehingga memengaruhi interpretasi statistik. Untuk mendeteksi kondisi tersebut digunakan pendekatan Glejser. Dalam prosedur ini, probabilitas di atas 0,05 mengindikasikan bahwa varians residual masih berada pada kondisi yang stabil, sedangkan probabilitas di bawah ambang tersebut mengisyaratkan adanya pola heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengevaluasi keterkaitan antara konstruk, diimplementasikan pendekatan regresi linier berganda. Teknik ini memungkinkan pembacaan kontribusi masing-masing faktor secara terpisah sekaligus secara kolektif terhadap perubahan tingkat kemandirian fiskal. Selain memberikan informasi mengenai arah dan kekuatan keterkaitan setiap variabel bebas, pendekatan ini juga memperlihatkan seberapa besar kemampuan keseluruhan model dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat. (Basuki & Prawoto, 2017) menjelaskan bahwa regresi linier berganda menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

dalam studi ekonomi dan keuangan karena mampu mengakomodasi lebih dari satu faktor penjelas dalam satu persamaan.

Untuk merepresentasikan keterkaitan ketiga konstruk digunakan suatu persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Kemandirian Fiskal (variabel dependen)
- X_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_2 : Transfer Ke Daerah (TKD)
- β_0 : Konstanta (intersep)
- β_1, β_2 : Koefisien regresi untuk variabel independen
- ϵ : Error atau residual

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji signifikansi individual (uji statistik t)

Untuk menelusuri posisi masing-masing X terhadap Y secara terpisah digunakan statistik t . Prosedur ini tidak menilai kekuatan persamaan secara keseluruhan, melainkan memeriksa apakah setiap komponen penjelas masih memiliki relevansi setelah ditempatkan dalam model (Widarjono, 2005). menjelaskan bahwa keputusan diperoleh melalui pembacaan nilai Prob. pada tingkat kesalahan 5 persen. Rumusan hipotesis yang digunakan yaitu:

- $H_0 : \beta = 0$ (Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).
- $H_1 : \beta \neq 0$ (Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

1. Prob. di bawah 0,05 menandakan bahwa X yang diuji masih memiliki kontribusi terhadap perubahan Y sehingga H_0 tidak dipertahankan.
2. Prob. di atas 0,05 mengindikasikan bahwa keberadaan X belum cukup untuk menjelaskan perubahan Y secara individual sehingga H_0 tetap dipertahankan.

3.6.5.2 Uji signifikansi simultan (uji statistik f)

Berbeda dengan statistik t yang memeriksa satu per satu prediktor, statistik F diarahkan untuk mengevaluasi seluruh X dalam satu paket persamaan. (Widarjono, 2005). menjelaskan bahwa prosedur ini digunakan untuk memastikan apakah model panel yang dibangun memiliki kapasitas yang memadai untuk menjelaskan fenomena yang diamati. Rumusan hipotesis yang digunakan adalah:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (Seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).
- $H_1 : \text{Minimal ada satu } \beta_i \neq 0$ (Seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).

Penetapan keputusan dilakukan melalui pembacaan nilai Prob. F-statistic yang dihasilkan model.

1. Apabila Prob. F-statistic berada di bawah 0,05 maka H_0 tidak dipertahankan. Situasi ini mengindikasikan bahwa kombinasi seluruh X mampu menjelaskan perubahan Y dan persamaan yang dibentuk layak digunakan pada tahap berikutnya.
2. Apabila Prob. F-statistic melampaui 0,05 maka H_0 tetap dipertahankan. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa persamaan yang dibangun belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menerangkan perubahan Y.

3.6.5.3 Koefisien determinasi (R^2)

Setelah kelayakan model diperoleh, perhatian berikutnya diarahkan pada koefisien determinasi (R^2). Ukuran ini menggambarkan

berapa bagian perubahan Y yang dapat diterangkan oleh seluruh X yang berada dalam persamaan. Semakin mendekati angka satu, semakin besar pula informasi yang berhasil ditangkap model. (Soesana et al., 2023) menjelaskan bahwa nilai R^2 yang tinggi menandakan daya jelas model yang semakin kuat. Menurut Widarjono (2005), mengemukakan bahwa data cross-section lazim menghasilkan R^2 yang lebih rendah karena karakteristik setiap objek cenderung sangat beragam, sedangkan data time series umumnya menghasilkan R^2 yang lebih besar akibat pola data yang bergerak secara berkesinambungan dari waktu ke waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Obyek Penelitian

Jawa Timur merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional yang menempati bagian timur Pulau Jawa. Wilayahnya mencapai sekitar 48.036,84 km² dengan populasi lebih dari 42 juta jiwa yang tersebar pada 29 kabupaten dan 9 kota. Kawasan ini dipilih karena menghadirkan kontras fiskal yang sangat mencolok. Pada satu sisi terdapat Surabaya dan Sidoarjo yang didominasi aktivitas industri, perdagangan, serta jasa modern. Pada sisi lain terdapat wilayah seperti Pacitan dan Trenggalek yang masih bertumpu pada sektor primer. Perbedaan struktur ekonomi tersebut menciptakan spektrum kemampuan fiskal yang luas, sehingga Jawa Timur menjadi ruang yang relevan untuk mengamati dinamika PAD, TKD, dan KF.

Sepanjang 2019–2023, kondisi KF di Jawa Timur bergerak dalam pola yang relatif stabil meskipun ketergantungan terhadap transfer pusat masih terlihat cukup kuat. Tahun 2019 mencatat rasio kemandirian sekitar 32,46 persen. Angka tersebut sedikit bergeser menjadi 32,27 persen pada tahun berikutnya ketika aktivitas ekonomi mengalami perlambatan akibat pandemi. Tahun 2021 memperlihatkan penurunan yang lebih tajam hingga sekitar 19,63 persen, menggambarkan meningkatnya peran pendanaan dari pemerintah pusat selama masa pemulihan. Memasuki 2022 dan 2023 situasinya mulai berubah. Kapasitas fiskal daerah mengalami penguatan yang tercermin dari nilai KFD sebesar 1,952 dengan kategori sedang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan daerah dalam menopang kebutuhan pemerintahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Penguatan tersebut juga tercermin pada perkembangan PAD. Realisasi PAD Jawa Timur meningkat dari sekitar Rp21,25 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22,32 triliun pada tahun 2023. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa sumber-sumber penerimaan lokal mulai memberikan ruang yang lebih besar dalam struktur pendapatan daerah. Optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset menjadi faktor yang memperkuat posisi PAD. Walaupun KF belum mencapai kategori tinggi, arah pergerakan selama beberapa tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan menuju struktur fiskal yang lebih mandiri.

4.1.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur

PP No. 8 2006 mewajibkan setiap entitas pelaporan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Kewajiban tersebut mencakup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dokumen yang harus disajikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Keempat komponen tersebut menjadi media utama untuk menilai transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

4.1.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Konsep ini merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari kapasitas ekonomi internal daerah dan dipungut sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah menempatkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan sah lainnya sebagai unsur pembentuk PAD. Dalam kajian ini, informasi PAD yang digunakan berasal dari periode 2019–2023. Penyajiannya dituangkan melalui tabel dan grafik agar pola pergerakan antar kabupaten/kota di Jawa Timur dapat terlihat dengan lebih jelas.

4.1.1.3 Transfer Ke Daerah

Konsep ini merupakan mekanisme distribusi fiskal yang berasal

dari APBN dan dialirkan kepada pemerintah daerah. Instrumen ini berfungsi menjaga keberlangsungan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sekaligus mendukung agenda desentralisasi fiskal. Melalui TKD, pemerintah pusat menyediakan dukungan pembiayaan agar pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pemerataan kesejahteraan dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah.

Data PAD yang digunakan mencakup rentang lima tahun, yaitu 2019–2023. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur pendapatan daerah, data tersebut dipadukan dengan informasi TKD seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rincian masing-masing daerah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik guna memudahkan pembacaan pola distribusi serta perbandingan antarwilayah.

Tabel 4. 1 Dana Trasfer Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2019- 2023

No.	Kota/Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Lamongan	2.154,34 M	2.176,42 M	2.036,82 M	2.187,58 M	2.323,75 M
2.	Kab. Bangkalan	1.874,84 M	1.819,34 M	1.734,28 M	1.855,29 M	1.783,15 M
3.	Kab. Lumajang	1.675,54 M	1.662,38 M	1.572,64 M	1.547,03 M	1.610,04 M
4.	Kab. Madiun	1.581,08 M	1.515,68 M	1.471,90 M	1.477,98 M	1.567,28 M
5.	Kab. Magetan	1.430,44 M	1.519,82 M	1.455,44 M	1.450,83 M	1.444,12 M
6.	Kab. Malang	3.031,08 M	2.948,22 M	2.817,38 M	2.635,18 M	2.770,11 M
7.	Kab. Mojokerto	1.769,71 M	1.732,04 M	1.682,16 M	1.570,44 M	1.712,41 M
8.	Kab. Nganjuk	1.683,82 M	1.791,46 M	1.580,96 M	1.557,39 M	1.785,67 M
9.	Kab. Ngawi	1.765,17 M	1.768,69 M	1.730,23 M	1.679,24 M	1.916,64 M
10.	Kab. Pacitan	1.432,09 M	1.385,44 M	1.317,69 M	1.362,47 M	1.335,17 M
11.	Kab. Pamekasan	1.556,60 M	1.499,57 M	1.464,23 M	1.532,19 M	1.541,49 M
12.	Kab. Pasuruan	2.399,63 M	2.414,12 M	2.177,56 M	2.329,97 M	2.438,75 M
13.	Kab. Ponorogo	1.857,98 M	1.859,69 M	1.720,74 M	1.813,47 M	1.718,04 M
14.	Kab. Probolinggo	1.940,68 M	1.975,96 M	1.876,62 M	1.946,83 M	1.769,02 M
15.	Kab. Sampang	1.488,87 M	1.508,87 M	1.500,48 M	1.514,73 M	1.510,51 M

16.	Kab. Sidoarjo	2.127,23 M	2.196,29 M	2.014,32 M	2.267,78 M	2.376,79 M
17.	Kab. Situbondo	1.419,73 M	1.410,39 M	1.322,64 M	1.352,34 M	1.346,31 M
18.	Kab. Sumenep	2.048,64 M	1.998,46 M	1.936,73 M	1.911,34 M	2.057,13 M
19.	Kab. Trenggalek	1.572,81 M	1.508,67 M	1.421,09 M	1.495,48 M	1.419,37 M
20.	Kab. Tuban	1.822,16 M	1.845,75 M	1.683,81 M	1.721,89 M	2.295,51 M
21.	Kab. Tulungagung	2.008,52 M	1.936,13 M	1.849,53 M	1.897,93 M	1.849,63 M
22.	Kab. Blitar	701,61 M	1.874,81 M	1.766,78 M	1.820,37 M	1.855,65 M
23.	Kab. Bojonegoro	3.933,21 M	3.018,06 M	2.894,85 M	3.189,18 M	4.145,43 M
24.	Kab. Bondowoso	1.699,76 M	1.679,35 M	1.614,27 M	1.574,69 M	1.582,89 M
25.	Kab. Gresik	1.822,96 M	1.834,00 M	1.710,22 M	1.869,69 M	1.869,13 M
26.	Kab. Jember	2.665,89 M	2.793,79 M	2.569,37 M	2.790,21 M	2.786,89 M
27.	Kab. Jombang	1.693,86 M	1.693,12 M	1.899,18 M	1.937,86 M	2.037,73 M
28.	Kab. Kediri	2.256,87 M	2.197,61 M	2.198,81 M	2.163,54 M	2.176,56 M
29.	Kab. Banyuwangi	2.365,43 M	772,30 M	2.200,95 M	2.300,08 M	2.435,68 M
30.	Kota Blitar	701,61 M	655,39 M	605,30 M	589,60 M	619,66 M
31.	Kota Kediri	813,80 M	883,24 M	832,43 M	840,74 M	958,73 M
32.	Kota Madiun	785,55 M	736,52 M	692,15 M	671,77 M	730,40 M
33.	Kota Malang	1.289,52 M	1.275,09 M	1.198,11 M	1.084,31 M	1.245,31 M
34.	Kota Mojokerto	630,80 M	590,49 M	580,06 M	522,36 M	644,06 M
35.	Kota Pasuruan	682,48 M	625,51 M	594,95 M	618,84 M	641,22 M
36.	Kota Probolinggo	761,55 M	740,20 M	671,85 M	608,49 M	596,19 M
37.	Kota Surabaya	2.401,96 M	2.360,28 M	2.069,38 M	2.501,59 M	2.575,68 M
38.	Kota Batu	744,68 M	703,13 M	689,97 M	656,05 M	686,66 M

Tabel 4. 2 Kemandirian Fiskal Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2019-2023

No.	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Bangkalan	1.23	1.26	1.28	1.23	1.25

2.	Kab. Banyuwangi	1.34	4.32	1.38	1.30	1.36
3.	Kab. Blitar	1.24	1.27	1.29	1.28	1.34
4.	Kab. Bojonegoro	1.18	1.35	1.31	1.30	1.26
5.	Kab. Bondowoso	1.20	1.22	1.24	1.22	1.24
6.	Kab. Gresik	1.67	1.86	1.91	1.84	2.07
7.	Kab. Jember	1.38	1.42	1.44	1.37	1.41
8.	Kab. Jombang	1.56	1.58	1.37	1.42	1.35
9.	Kab. Kediri	1.30	1.34	1.26	1.19	1.31
10.	Kab. Lamongan	1.36	1.41	1.44	1.36	1.39
11.	Kab. Lumajang	1.34	1.37	1.36	1.36	1.29
12.	Kab. Madiun	1.23	1.26	1.24	1.28	1.27
13.	Kab. Magetan	1.22	1.23	1.24	1.21	1.26
14.	Kab. Malang	1.32	1.40	1.42	1.59	1.58
15.	Kab. Mojokerto	1.42	1.45	1.46	1.50	1.46
16.	Kab. Nganjuk	1.33	1.33	1.35	1.40	1.29
17.	Kab. Ngawi	1.21	1.23	1.23	1.26	1.25
18.	Kab. Pacitan	1.21	1.24	1.25	1.20	1.23
19.	Kab. Pamekasan	1.20	1.23	1.24	1.25	1.27
20.	Kab. Pasuruan	1.43	1.48	1.51	1.42	1.44
21.	Kab. Ponorogo	1.24	1.28	1.28	1.27	1.00
22.	Kab. Probolinggo	1.22	1.24	1.24	1.20	1.21
23.	Kab. Sampang	1.20	1.24	1.25	1.20	1.24
24.	Kab. Sidoarjo	1.99	2.07	2.09	1.98	2.05
25.	Kab. Situbondo	1.19	1.24	1.30	1.28	1.29
26.	Kab. Sumenep	1.19	1.20	1.19	1.23	1.18
27.	Kab. Trenggalek	1.28	1.31	1.31	1.24	1.28
28.	Kab. Tuban	1.31	1.41	1.40	1.44	1.33
29.	Kab. Tulungagung	1.32	1.33	1.29	1.32	1.39
30.	Kota Batu	1.32	1.42	1.45	1.40	1.47

31.	Kota Blitar	1.36	1.40	1.46	1.49	1.46
32.	Kota Kediri	1.40	1.40	1.47	1.47	1.44
33.	Kota Madiun	1.40	1.44	1.45	1.46	1.47
34.	Kota Malang	1.63	1.80	1.88	1.92	2.06
35.	Kota Mojokerto	1.47	1.50	1.50	1.54	1.49
36.	Kota Pasuruan	1.31	1.36	1.31	1.34	1.42
37.	Kota Probolinggo	1.41	1.46	1.53	1.55	0.15
38.	Kota Surabaya	3.65	3.85	4.19	3.81	3.87

4.1.2 Analisis Data

4.1.2.1 Statistik Deskriptif

Gambar 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Date: 07/04/26 Time: 20:39
Sample: 2019 2023

	Y	X1	X2
Mean	1.442540	2434.083	1673.523
Median	1.340000	2277.200	1699.760
Maximum	4.320000	9533.440	4145.430
Minimum	0.150000	88.57000	522.3600
Std. Dev.	0.468993	1361.830	651.0332
Skewness	4.221474	2.450802	0.380580
Kurtosis	24.14158	12.53580	3.890963
Jarque-Bera	4081.218	905.2878	10.81378
Probability	0.000000	0.000000	0.004486
Sum	272.6400	460041.7	316295.8
Sum Sq. Dev.	41.35138	3.49E+08	79682709
Observations	189	189	189

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kemandirian Fiskal (KF) sebagai variabel dependen, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai variabel independen. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.1.

1. Variabel Dependen (Y)

KF memiliki 189 observasi dengan rentang nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 1,442540 dengan nilai tengah (*Median*) sebesar 1,340000. Rentang nilai pada variabel ini berkisar antara nilai minimum sebesar 0,150000 hingga nilai maksimum sebesar 4,320000. Tingkat sebaran atau deviasi standar (*Std. Dev.*) dari variabel *Y* menunjukkan angka sebesar 0,468993.

2. Variabel Independen X1

PAD tercatat menunjukkan nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 2434,083 dengan nilai tengah (*Median*) sebesar 2277,200. Variabel ini memiliki nilai terendah (*Minimum*) sebesar 88,57000 dan mencapai nilai tertinggi (*Maximum*) sebesar 9533,440. Adapun tingkat sebaran datanya yang ditunjukkan melalui nilai standar deviasi (*Std. Dev.*) adalah sebesar 1361,830.

3. Variabel Independen X2

TKD memiliki nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 1673,523 dengan nilai tengah (*Median*) sebesar 1699,760. Data pada variabel ini tersebar dari nilai minimum sebesar 522,3600 hingga nilai maksimum sebesar 4145,430. Nilai standar deviasi (*Std. Dev.*) yang diperoleh untuk variabel X_2 adalah sebesar 651,0332.

4.1.2.2 Analisis Pemilihan Model

4.1.2.2.1 Uji Chow

Gambar 4. 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.580193	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	164.332944	37	0.0000

Uji Chow (*Chow Test*) dilakukan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*Prob.*) pada Cross-section F dan Cross-section Chi-square dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (0,05). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan EViews diperoleh nilai Cross-section F sebesar 5,580193 dengan nilai probabilitas 0,0000. Selain itu, nilai Cross-section Chi-square sebesar 164,332944 dengan nilai probabilitas 0,0000. Karena kedua nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, berdasarkan Uji Chow, model estimasi data panel yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

4.1.2.2.2 Uji Hausman

Gambar 4. 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	97.247288	2	0.0000

Uji Hausman (*Hausman Test*) dilakukan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*Prob.*) Chi-Square Statistic dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya, apabila nilai

probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM) (Gujarati & Porter, 2009; Widarjono, 2018).

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Hausman Test, diperoleh nilai Chi-Square Statistic sebesar 97,247288 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model estimasi data panel yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, kedua pengujian secara konsisten menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model estimasi yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, model Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model yang digunakan dalam analisis regresi data panel. Prosedur pemilihan model tersebut telah sesuai dengan tahapan analisis regresi data panel yang menjelaskan bahwa keputusan pemilihan model didasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari Uji Chow kemudian dikonfirmasi melalui Uji Hausman (Baltagi, 2021; Widarjono, 2018).

4.1.2.2.3 Lagrange Multiplier (LM)

Gambar 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	5.336316 (0.0209)	0.376000 (0.5398)	5.712316 (0.0168)
Honda	2.310047 (0.0104)	-0.613188 (0.7301)	1.199860 (0.1151)
King-Wu	2.310047 (0.0104)	-0.613188 (0.7301)	0.139028 (0.4447)
Standardized Honda	2.646187 (0.0041)	-0.341808 (0.6338)	-3.274589 (0.9995)
Standardized King-Wu	2.646187 (0.0041)	-0.341808 (0.6338)	-2.843167 (0.9978)
Gourieroux, et al.	--	--	5.336316 (0.0278)

Uji Lagrange Multiplier (*Lagrange Multiplier Test*) digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*Prob.*) Breusch-Pagan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM).

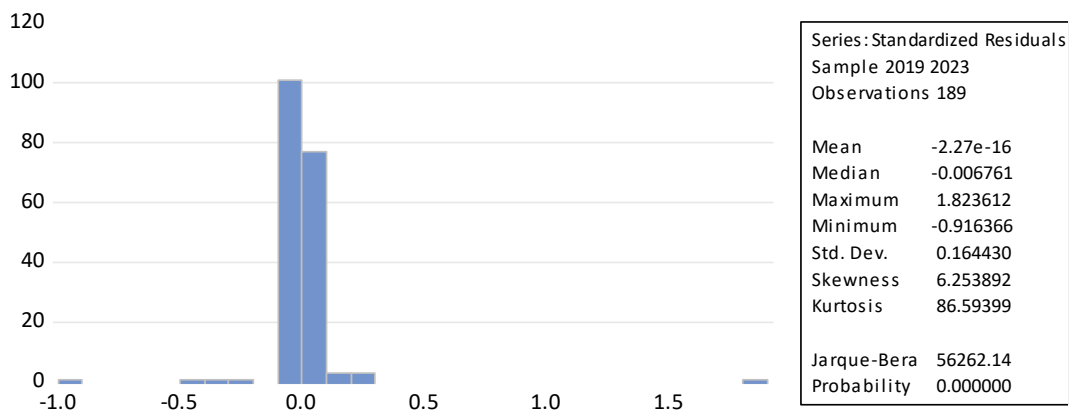
Berdasarkan hasil pengujian Lagrange Multiplier (LM Test) diperoleh nilai Breusch-Pagan pada bagian Cross-section sebesar 5,336316 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0209. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier (LM), model yang lebih tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM) adalah Random Effect Model (REM).

Namun demikian, hasil Uji Lagrange Multiplier tidak dijadikan dasar dalam penentuan model estimasi data panel pada penelitian ini. Hal ini karena hasil Uji Chow dan Uji Hausman telah secara konsisten menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model estimasi yang paling tepat digunakan. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam analisis regresi data panel pada penelitian ini tetap Fixed Effect Model (FEM).

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Jarque-Bera Test, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,667321 dengan nilai Probability sebesar 0,716303. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,716303 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi data panel pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Gambar 4. 6 Uji Multikolinieritas

	X2	X1
X2	1.000000	0.738564
X1	0.738564	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dan **Transfer ke Daerah (TKD)** sebesar **0,5063**. Nilai korelasi tersebut lebih kecil dari **0,90** ($0,5063 < 0,90$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Dengan demikian, model regresi data panel dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi bebas multikolinearitas.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)

Method: Panel Least Squares

Date: 07/04/26 Time: 21:40

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.218825	0.040015	5.468551	0.0000
X1	1.37E-05	1.03E-05	1.322523	0.1880
X2	-0.000119	3.07E-05	-3.893442	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.681283	Mean dependent var	0.052184
Adjusted R-squared	0.597861	S.D. dependent var	0.092712
S.E. of regression	0.058793	Akaike info criterion	-2.644115
Sum squared resid	0.515032	Schwarz criterion	-1.958031
Log likelihood	289.8689	Hannan-Quinn criter.	-2.366166
F-statistic	8.166660	Durbin-Watson stat	1.951818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa variabel **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** memiliki nilai probabilitas sebesar **0,9837**, sedangkan variabel **Transfer ke Daerah (TKD)** memiliki nilai probabilitas sebesar **0,0685**. Kedua nilai probabilitas tersebut lebih besar dari **0,05**, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini **tidak mengalami gejala heteroskedastisitas**. Dengan

demikian, model regresi data panel telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Uji t

Gambar 4. 8 Hasil Uji t

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: Y C X2 X1

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	726.2530	38	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	73.51792	186
Unrestricted LogL	436.6444	186

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/04/26 Time: 21:05

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 189

Iterate weights to convergence

Convergence achieved after 20 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.345546	0.003574	376.4311	0.0000
X2	-0.000768	4.69E-06	-163.7426	0.0000
X1	0.000571	3.31E-06	172.4060	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.993841	Mean dependent var	24.93175
Adjusted R-squared	0.993774	S.D. dependent var	36.88762
S.E. of regression	0.191522	Akaike info criterion	-4.588830
Sum squared resid	6.822601	Schwarz criterion	-4.537374
Log likelihood	436.6444	Hannan-Quinn criter.	-4.567984
F-statistic	15006.04	Durbin-Watson stat	1.023876
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.834873	Mean dependent var	1.442540
Sum squared resid	6.828246	Durbin-Watson stat	1.461145

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Menurut Ghozali (2018), pengambilan keputusan dalam Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*Prob.*) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari **0,05**, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen..

1. Pengaruh X1 terhadap Y

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000571, nilai t-statistic sebesar 172,4060, dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal.

2. Pengaruh X2 terhadap Y

Variabel Transfer ke Daerah (TKD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,000768, nilai t-statistic sebesar -163,7426, dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal.

4.1.4.2 Uji f

Gambar 4. 9 Hasil Uji f

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: Y C X2 X1

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	726.2530	38	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	73.51792	186
Unrestricted LogL	436.6444	186

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/04/26 Time: 21:05

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 189

Iterate weights to convergence

Convergence achieved after 20 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.345546	0.003574	376.4311	0.0000
X2	-0.000768	4.69E-06	-163.7426	0.0000
X1	0.000571	3.31E-06	172.4060	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.993841	Mean dependent var	24.93175
Adjusted R-squared	0.993774	S.D. dependent var	36.88762
S.E. of regression	0.191522	Akaike info criterion	-4.588830
Sum squared resid	6.822601	Schwarz criterion	-4.537374
Log likelihood	436.6444	Hannan-Quinn criter.	-4.567984
F-statistic	15006.04	Durbin-Watson stat	1.023876
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.834873	Mean dependent var	1.442540
Sum squared resid	6.828246	Durbin-Watson stat	1.461145

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2018), dasar pengambilan keputusan pada Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistic dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai F-statistic sebesar 15006,04 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal diterima.

4.1.4.3 Koefisien determinasi (R^2)

Gambar 4. 10 Hasil Koefisien determinasi (R^2)

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test				
Equation: UNTITLED				
Specification: Y C X2 X1				
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic				
	Value	df	Probability	
Likelihood ratio	726.2530	38	0.0000	
LR test summary:				
	Value	df		
Restricted LogL	73.51792	186		
Unrestricted LogL	436.6444	186		
Unrestricted Test Equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 07/04/26 Time: 21:05				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 38				
Total panel (unbalanced) observations: 189				
Iterate weights to convergence				
Convergence achieved after 20 weight iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.345546	0.003574	376.4311	0.0000
X2	-0.000768	4.69E-06	-163.7426	0.0000
X1	0.000571	3.31E-06	172.4060	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.993841	Mean dependent var	24.93175	
Adjusted R-squared	0.993774	S.D. dependent var	36.88762	
S.E. of regression	0.191522	Akaike info criterion	-4.588830	
Sum squared resid	6.822601	Schwarz criterion	-4.537374	
Log likelihood	436.6444	Hannan-Quinn criter.	-4.567984	
F-statistic	15006.04	Durbin-Watson stat	1.023876	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.834873	Mean dependent var	1.442540	
Sum squared resid	6.828246	Durbin-Watson stat	1.461145	

Koefisien determinasi (Adjusted R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Ghazali (2018), nilai Adjusted R^2 menunjukkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan

oleh variabel independen dalam model regresi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.xx diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,993774 atau 99,38%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi Kemandirian Fiskal dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 99,38%, sedangkan sisanya sebesar 0,62% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) menghasilkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,000571 dengan nilai Prob. 0,0000. Nilai probabilitas tersebut berada jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dipisahkan dari perubahan tingkat Kemandirian Fiskal selama periode 2019–2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pergerakan PAD berjalan searah dengan pergerakan tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Ketika penerimaan daerah yang bersumber dari potensi internal mengalami peningkatan, kapasitas fiskal daerah juga akan bergerak ke arah yang lebih kuat.

Arah hubungan yang positif antara PAD dan kemandirian fiskal menggambarkan bahwa meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan yang berasal dari sumber internal akan memperbesar kemampuan pembiayaan secara mandiri. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi komponen utama dalam memperkuat struktur fiskal daerah. Ketika sumber-sumber penerimaan

tersebut mengalami peningkatan, ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah juga semakin luas. Konsekuensinya, kebutuhan pembangunan daerah, penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan dapat dibiayai dengan proporsi yang lebih besar menggunakan sumber daya yang berasal dari daerah itu sendiri. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

Jika dikaitkan dengan *Agency Theory* (Teori Keagenan) dalam sektor publik, pemerintah daerah bertindak sebagai agent yang memperoleh mandat dari masyarakat sebagai principal untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan akuntabel. Kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal. Kondisi tersebut juga sejalan dengan fungsi alokasi dalam teori desentralisasi fiskal, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya sehingga pengalokasian sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kondisi tersebut tercermin pada daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi kuat seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten berada dalam kelompok dengan realisasi PAD yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Tingginya kemampuan menghasilkan penerimaan internal turut membentuk posisi fiskal yang lebih kuat sehingga tingkat kemandiriannya berada di atas rata-rata daerah lain. Pola ini memiliki kesesuaian dengan (Debora et al., 2023) serta (Wasil et al., 2020) yang menempatkan PAD sebagai komponen utama dalam menopang kemampuan keuangan daerah. Ketika kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah mengalami

peningkatan, ruang ketergantungan terhadap pemerintah pusat cenderung menyusut dan kapasitas pembiayaan mandiri menjadi semakin besar.

4.2.2 Pengaruh Transfer Ke Daerah terhadap Kemandirian Fiskal

Komponen Transfer ke Daerah (TKD) (X2) menghasilkan koefisien regresi bertanda negatif sebesar -0,000768 dengan nilai Prob. 0,0000. Nilai probabilitas tersebut berada jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa keberadaan Transfer ke Daerah tidak dapat dipisahkan dari perubahan tingkat Kemandirian Fiskal selama periode 2019–2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pergerakan Transfer ke Daerah berjalan berlawanan arah dengan pergerakan tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Ketika penerimaan daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah mengalami peningkatan, tingkat kemandirian fiskal daerah cenderung mengalami penurunan.

Hubungan yang bersifat negatif antara Transfer ke Daerah dan kemandirian fiskal menggambarkan bahwa semakin besar dana transfer yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Transfer ke Daerah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta bentuk transfer lainnya pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan antardaerah. Namun demikian, apabila proporsi Transfer ke Daerah lebih dominan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah, maka kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan menggunakan sumber pendapatan sendiri menjadi relatif lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya Transfer ke Daerah belum tentu mencerminkan meningkatnya kemampuan fiskal daerah secara mandiri.

Apabila dikaitkan dengan *Agency Theory* (Teori Keagenan), pemerintah daerah sebagai agent memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber penerimaan daerah secara efektif dan akuntabel guna memenuhi kepentingan masyarakat sebagai principal. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Sementara itu, berdasarkan Teori Desentralisasi Fiskal, pemberian transfer dari pemerintah pusat memang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan menjamin pemerataan pelayanan publik. Akan tetapi, tujuan utama desentralisasi fiskal tetap mendorong pemerintah daerah agar mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.

Kondisi tersebut masih dapat dijumpai pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah relatif rendah sehingga struktur pendapatannya masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun transfer tersebut mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki daerah tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan daerah yang mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama penerimaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Transfer ke Daerah yang tidak diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berpotensi menurunkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pola demikian memiliki kesesuaian dengan Nurkhayati, (2022), Liline & Khaeril, (2024), serta hasil penelitian Wasil et al., (2020) yang menggambarkan bahwa semakin dominan porsi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah, semakin sulit daerah mencapai tingkat kemandirian keuangan yang tinggi.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah (TKD) secara Simultan terhadap Kemandirian Fiskal

Pembacaan secara kolektif terhadap PAD dan TKD memperlihatkan Prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Angka tersebut berada jauh di bawah batas toleransi 0,05 sehingga keberadaan kedua komponen tersebut secara bersamaan tidak dapat dipisahkan dari perubahan tingkat kemandirian fiskal pada kabupaten dan kota di Jawa Timur selama periode 2019–2023. Dengan demikian, dinamika kemandirian fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan PAD semata ataupun dominasi TKD semata, melainkan merupakan konsekuensi dari interaksi keduanya dalam struktur pendapatan daerah.

Besarnya peranan PAD dan TKD dalam menerangkan perubahan kemandirian fiskal juga tercermin dari nilai R^2 yang mencapai 0,969269. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa 96,93 persen variasi kemandirian fiskal dapat diterangkan melalui kedua komponen tersebut secara bersamaan. Adapun porsi yang tidak terakomodasi hanya mencapai 3,07 persen dan berasal dari unsur-unsur lain di luar spesifikasi persamaan. Tingkat penjelasan yang sangat tinggi tersebut memperlihatkan bahwa REM yang digunakan memiliki kapasitas representasi yang kuat terhadap data observasi. Dengan kata lain, sebagian besar dinamika yang terjadi pada kemandirian fiskal daerah telah berhasil ditangkap oleh model yang digunakan.

Dalam struktur APBD, PAD dan TKD merupakan dua sumber penerimaan yang memiliki posisi sentral dalam membentuk kapasitas fiskal daerah. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga mencerminkan tingkat ketergantungan dan kemampuan fiskal suatu daerah. Nilai rata-rata kemandirian fiskal yang berada pada angka 1,443 memberikan gambaran bahwa mayoritas kabupaten dan kota di Jawa Timur masih berada pada fase transisi. Daerah-daerah tersebut belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri, namun juga tidak

sepenuhnya berada pada kondisi ketergantungan absolut terhadap pemerintah pusat. Situasi ini memperlihatkan adanya proses pergeseran menuju kapasitas fiskal yang lebih kuat, meskipun kecepatannya berbeda antarwilayah.

Kondisi fiskal di Jawa Timur diwarnai oleh disparitas wilayah yang cukup kentara. Di satu sisi, terdapat daerah urban berkapasitas fiskal tangguh yang mampu mendongkrak kemandiriannya melalui optimalisasi PAD. Di sisi lain, daerah berbasis agraris masih harus bersandar pada instrumen TKD demi menutup kesenjangan fiskal vertikal dan menggerakkan pelayanan publik. Oleh sebab itu, demi menaikkan derajat kemandirian fiskal secara menyeluruh dan berkelanjutan, strategi yang ditempuh tidak dapat hanya bertumpu pada satu sektor tunggal. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dituntut untuk secara simultan melakukan reformasi tata kelola keuangan lokal melalui intensifikasi PAD, sekaligus mengelola dan mengalokasikan pemanfaatan TKD dari pusat secara proporsional, efisien, dan berorientasi pada pembangunan sektor produktif daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap tingkat Kemandirian Fiskal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2023. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik yang dipilih melalui uji pemilihan model, beberapa poin penting dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Koefisien regresi sebesar 0,000571 dengan nilai probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan diikuti oleh peningkatan tingkat Kemandirian Fiskal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah menjadi faktor utama dalam memperkuat kapasitas fiskal. Semakin besar PAD yang berhasil dihimpun, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.
2. Transfer ke Daerah (TKD) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Koefisien regresi sebesar -0,000768 dengan nilai probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa peningkatan Transfer ke Daerah cenderung diikuti oleh penurunan tingkat Kemandirian Fiskal. Hasil tersebut menggambarkan bahwa besarnya dana transfer yang diterima daerah masih mencerminkan adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Semakin besar proporsi dana transfer dibandingkan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, maka tingkat kemandirian fiskal cenderung semakin rendah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Fiskal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000, yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap perubahan tingkat Kemandirian Fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian. Dengan demikian, PAD dan TKD merupakan faktor yang berperan penting dalam menentukan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
4. Koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,993774 atau 99,38% menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi Kemandirian Fiskal. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 99,38% perubahan Kemandirian Fiskal dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah, sedangkan 0,62% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
5. Secara umum, tingkat Kemandirian Fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2023 masih menunjukkan adanya variasi antar daerah. Daerah yang memiliki kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah cenderung memiliki tingkat Kemandirian Fiskal yang lebih tinggi, sedangkan daerah yang masih bergantung pada Transfer ke Daerah menunjukkan tingkat Kemandirian Fiskal yang relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD merupakan langkah penting dalam mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Merujuk pada rangkaian uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah pada masa mendatang.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu memperkuat PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset yang lebih produktif, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi menciptakan sumber penerimaan baru. Langkah tersebut penting untuk memperluas ruang fiskal sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan terhadap TKD dari pemerintah pusat.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat tetap perlu menyalurkan TKD secara proporsional, khususnya kepada daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal terbatas. Selain itu, dukungan dalam bentuk pembinaan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas kelembagaan juga diperlukan agar daerah mampu meningkatkan kemampuan fiskalnya secara berkelanjutan..

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kajian selanjutnya dapat memasukkan komponen lain seperti Belanja Modal, DAU, DAK, DBH, pertumbuhan ekonomi, PDRB, maupun jumlah penduduk agar gambaran mengenai pembentukan kemandirian fiskal dapat dibaca dari sudut yang lebih luas. Selain itu, perluasan wilayah observasi serta penambahan rentang waktu juga dapat memberikan cakupan informasi yang lebih beragam.

4. Bagi Akademisi

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pada ranah akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, PAD, TKD, serta perkembangan kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Dengan semakin banyaknya kajian pada bidang tersebut, pemahaman mengenai dinamika keuangan daerah di era otonomi dapat berkembang secara lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2024). Analisis Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jambura Economic Education Journal*, 6(1), 1–23.
- Agustina, F., Pramono, A. J., Akbar, B., & Alma'arif, A. (2022). Factors Determining Low Regional Financial Independence: Financial Autonomy and Degree of Decentralization. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 117–130. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1.701>
- Basuki, A. T. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews. *Rajawali Per.*, 1–239.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 1–315.
- Debora, D., Kantohe, M., Tarore, S., & Rantung, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 123–129. <https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8339>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Single-equation regression models. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach*.
- Gunawan, I., & Suebah, S. (2022). The Effect of Local Revenue on Economic Growth in Serang City. *Journal of Retail and Management*, 2(1), 54–76. <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/jumareta/article/view/1941>
- Hermalingga, J., Djaddang, S., & ... (2017). Peran Lain-lain PAD yang Sah dengan Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Modal: Perspektif Teori Fiskal Federalism. ... *Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 45–59. <http://jameb.stimlasharanjaya.ac.id/JAMEB/article/view/43>
- Ilyas, I. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9544>
- Laodini, A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara Periode 2010 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 217–228. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/49639>
- Liline, L. J., & Khaeril. (2024). Dampak Pendapatan Asli Daerah, Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 3(3), 198–211. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v3i3.104>
- Mamonto, C., Rotinsulu, T. O., & Tolosang, K. D. (2020). *PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP*

TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN / KOTA BOLAANG MONGONDOW RAYA TAHUN 2015-2018. 20(03), 33–44.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.026>

- Marya, M., & Handra, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 7(2), 409–418.
<https://doi.org/10.37481/sjr.v7i2.837>
- Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa : Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173–186. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.026>
- Melinda, R. (2024). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Ke Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Provinsi*
http://repository.unissula.ac.id/38553/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/38553/1/Akuntansi_31402300143_fullpdf.pdf
- Mubila, A. M. (2022). Implikasi Hukum Bisnis Atas Kebijakan Pajak: Kajian Terhadap Keadilan Dan Efisiensi Fiskal. *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, 1(2), 86–101.
- Nradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170.
<https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- NU Online., N. O. (n.d.-a). *Ayat Al Qu'an Surat Al – Qashas (28) ayat 41*.
- NU Online., N. O. (n.d.-b). *Ayat Al Qur'an Surat Al – Anbiya' (21) ayat 73*.
- NU Online., N. O. (n.d.-c). *Ayat Al Qur'an Surat Al – Isra' (17) ayat 71*.
- Nurkhayati, E. D. (2022). ... Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 11(2), 593–600.
<http://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/60%0Ahttps://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/download/60/40>
- Puja, R. R. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134.
<https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Saragih, F. M., Prasetya, M. D. A., & Zein, A. W. W. (2025). Membangun

- Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi dan Redistribusi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 293–298.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15570783>
- Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Suandi, I., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Makassar, U. N. (2016). *DANA ALOKASI TERHADAP PERTUMBUHAN*.
- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi pada Konteks Berbagai Issue di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802–4821.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973>
- Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 99–109. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441>
- Widarjono, A. (2005). Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi . In *Ekonosia*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Kota/Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
	Kab. Lamongan	2.939,29 M	3.076,80 M	2.930,44 M	2.977,27 M	3.236,14 M
	Kab. Bangkalan	2.308,66 M	2.300,13 M	2.223,07 M	2.277,20 M	2.235,46 M
	Kab. Lumajang	2.241,13 M	2.282,44 M	2.136,61 M	2.109,08 M	2.074,68 M
	Kab. Madiun	1.948,22 M	1.912,89 M	1.817,81 M	1.887,05 M	1.988,91 M
	Kab. Magetan	1.750,81 M	1.865,23 M	1.811,07 M	1.758,40 M	1.817,35 M
	Kab. Malang	4.001,64 M	4.129,88 M	4.004,15 M	4.196,21 M	4.372,86 M
	Kab. Mojokerto	2.513,66 M	2.507,88 M	2.455,78 M	2.350,99 M	2.506,31 M
	Kab. Nganjuk	2.238,26 M	2.375,84 M	2.134,37 M	2.174,44 M	2.302,59 M
	Kab. Ngawi	2.136,55 M	2.181,18 M	2.127,46 M	2.122,60 M	2.389,60 M
	Kab. Pacitan	1.726,28 M	1.715,23 M	1.652,38 M	1.638,57 M	1.637,26 M
	Kab. Pamekasan	1.870,84 M	1.841,86 M	1.810,45 M	1.908,21 M	1.957,01 M
	Kab. Pasuruan	3.436,52 M	3.561,82 M	3.277,92 M	3.304,78 M	3.515,29 M
	Kab. Ponorogo	2.306,44 M	2.376,74 M	2.205,82 M	2.298,91 M	1.718,04 M
	Kab. Probolinggo	2.376,74 M	2.445,28 M	2.336,11 M	2.327,96 M	2.147,63 M
	Kab. Sampang	1.791,09 M	1.867,75 M	1.871,47 M	1.819,41 M	1.878,23 M
	Kab. Sidoarjo	4.226,49 M	4.536,59 M	4.210,82 M	4.500,31 M	4.874,35 M
	Kab. Situbondo	1.685,68 M	1.747,72 M	1.718,47 M	1.727,32 M	1.739,66 M
	Kab. Sumenep	2.441,43 M	2.407,65 M	2.311,24 M	2.349,23 M	2.420,64 M
	Kab. Trenggalek	2.015,35 M	1.977,63 M	1.855,49 M	1.855,15 M	1.810,06 M
	Kab. Tuban	2.389,12 M	2.601,40 M	2.360,12 M	2.480,88 M	3.062,66 M
	Kab. Tulungagung	2.647,74 M	2.583,35 M	2.394,26 M	2.508,71 M	2.575,44 M
	Kab. Blitar	2.362,57 M	2.382,05 M	2.280,05 M	2.322,45 M	2.484,83 M
	Kab. Bojonegoro	4.630,27 M	4.084,71 M	3.788,74 M	4.148,11 M	5.219,45 M
	Kab. Bondowoso	2.036,17 M	2.056,33 M	1.999,23 M	1.926,49 M	1.959,48 M
	Kab. Gresik	3.040,61 M	3.414,64 M	3.271,54 M	3.439,39 M	3.877,20 M
	Kab. Jember	3.671,79 M	3.960,91 M	3.708,36 M	3.811,39 M	3.923,05 M
	Kab. Jombang	2.649,41 M	2.678,66 M	2.609,85 M	2.744,31 M	2.744,31 M
	Kab. Kediri	2.943,21 M	2.945,41 M	2.777,29 M	2.575,24 M	2.841,13 M
	Kab. Banyuwangi	3.170,40 M	3.339,78 M	3.036,32 M	2.989,97 M	3.303,25 M
	Kota Blitar	956,92 M	920,53 M	885,33 M	877,51 M	907,33 M
	Kota Kediri	1.139,35 M	1.238,78 M	1.225,58 M	1.236,95 M	1.378,90 M
	Kota Madiun	1.099,35 M	1.056,91 M	1.003,82 M	983,49 M	1.071,01 M
	Kota Malang	2.101,36 M	2.289,32 M	2.250,89 M	2.076,98 M	2.561,83 M
	Kota Mojokerto	926,11 M	885,82 M	869,69 M	805,27 M	958,18 M
	Kota Pasuruan	890,66 M	848,97 M	780,83 M	831,90 M	911,20 M

	Kota Probolinggo	1.072,63 M	1.077,82 M	1.024,91 M	945,77 M	88,57 M
	Kota Surabaya	8.758,81 M	9.083,09 M	8.660,40 M	9.533,44 M	10,723,82M
	Kota Batu	983,71 M	1.000,05 M	998,77 M	920,58 M	1.008,63 M

Lampiran 2. Tabel Transfer Ke Daerah (TKD)

No.	Kota/Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Lamongan	2.154,34 M	2.176,42 M	2.036,82 M	2.187,58 M	2.323,75 M
2.	Kab. Bangkalan	1.874,84 M	1.819,34 M	1.734,28 M	1.855,29 M	1.783,15 M
3.	Kab. Lumajang	1.675,54 M	1.662,38 M	1.572,64 M	1.547,03 M	1.610,04 M
4.	Kab. Madiun	1.581,08 M	1.515,68 M	1.471,90 M	1.477,98 M	1.567,28 M
5.	Kab. Magetan	1.430,44 M	1.519,82 M	1.455,44 M	1.450,83 M	1.444,12 M
6.	Kab. Malang	3.031,08 M	2.948,22 M	2.817,38 M	2.635,18 M	2.770,11 M
7.	Kab. Mojokerto	1.769,71 M	1.732,04 M	1.682,16 M	1.570,44 M	1.712,41 M
8.	Kab. Nganjuk	1.683,82 M	1.791,46 M	1.580,96 M	1.557,39 M	1.785,67 M
9.	Kab. Ngawi	1.765,17 M	1.768,69 M	1.730,23 M	1.679,24 M	1.916,64 M
10.	Kab. Pacitan	1.432,09 M	1.385,44 M	1.317,69 M	1.362,47 M	1.335,17 M
11.	Kab. Pamekasan	1.556,60 M	1.499,57 M	1.464,23 M	1.532,19 M	1.541,49 M
12.	Kab. Pasuruan	2.399,63 M	2.414,12 M	2.177,56 M	2.329,97 M	2.438,75 M
13.	Kab. Ponorogo	1.857,98 M	1.859,69 M	1.720,74 M	1.813,47 M	1.718,04 M
14.	Kab. Probolinggo	1.940,68 M	1.975,96 M	1.876,62 M	1.946,83 M	1.769,02 M
15.	Kab. Sampang	1.488,87 M	1.508,87 M	1.500,48 M	1.514,73 M	1.510,51 M
16.	Kab. Sidoarjo	2.127,23 M	2.196,29 M	2.014,32 M	2.267,78 M	2.376,79 M
17.	Kab. Situbondo	1.419,73 M	1.410,39 M	1.322,64 M	1.352,34 M	1.346,31 M
18.	Kab. Sumenep	2.048,64 M	1.998,46 M	1.936,73 M	1.911,34 M	2.057,13 M
19.	Kab. Trenggalek	1.572,81 M	1.508,67 M	1.421,09 M	1.495,48 M	1.419,37 M
20.	Kab. Tuban	1.822,16 M	1.845,75 M	1.683,81 M	1.721,89 M	2.295,51 M
21.	Kab. Tulungagung	2.008,52 M	1.936,13 M	1.849,53 M	1.897,93 M	1.849,63 M
22.	Kab. Blitar	701,61 M	1.874,81 M	1.766,78 M	1.820,37 M	1.855,65 M

23.	Kab. Bojonegoro	3.933,21 M	3.018,06 M	2.894,85 M	3.189,18 M	4.145,43 M
24.	Kab. Bondowoso	1.699,76 M	1.679,35 M	1.614,27 M	1.574,69 M	1.582,89 M
25.	Kab. Gresik	1.822,96 M	1.834,00 M	1.710,22 M	1.869,69 M	1.869,13 M
26.	Kab. Jember	2.665,89 M	2.793,79 M	2.569,37 M	2.790,21 M	2.786,89 M
27.	Kab. Jombang	1.693,86 M	1.693,12 M	1.899,18 M	1.937,86 M	2.037,73 M
28.	Kab. Kediri	2.256,87 M	2.197,61 M	2.198,81 M	2.163,54 M	2.176,56 M
29.	Kab. Banyuwangi	2.365,43 M	772,30 M	2.200,95 M	2.300,08 M	2.435,68 M
30.	Kota Blitar	701,61 M	655,39 M	605,30 M	589,60 M	619,66 M
31.	Kota Kediri	813,80 M	883,24 M	832,43 M	840,74 M	958,73 M
32.	Kota Madiun	785,55 M	736,52 M	692,15 M	671,77 M	730,40 M
33.	Kota Malang	1.289,52 M	1.275,09 M	1.198,11 M	1.084,31 M	1.245,31 M
34.	Kota Mojokerto	630,80 M	590,49 M	580,06 M	522,36 M	644,06 M
35.	Kota Pasuruan	682,48 M	625,51 M	594,95 M	618,84 M	641,22 M
36.	Kota Probolinggo	761,55 M	740,20 M	671,85 M	608,49 M	596,19 M
37.	Kota Surabaya	2.401,96 M	2.360,28 M	2.069,38 M	2.501,59 M	2.575,68 M
38.	Kota Batu	744,68 M	703,13 M	689,97 M	656,05 M	686,66 M

Lampiran 3. Tabel Kemandirian Fiskal

No.	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Bangkalan	1.23	1.26	1.28	1.23	1.25
2.	Kab. Banyuwangi	1.34	4.32	1.38	1.30	1.36
3.	Kab. Blitar	1.24	1.27	1.29	1.28	1.34
4.	Kab. Bojonegoro	1.18	1.35	1.31	1.30	1.26
5.	Kab. Bondowoso	1.20	1.22	1.24	1.22	1.24
6.	Kab. Gresik	1.67	1.86	1.91	1.84	2.07
7.	Kab. Jember	1.38	1.42	1.44	1.37	1.41
8.	Kab. Jombang	1.56	1.58	1.37	1.42	1.35
9.	Kab. Kediri	1.30	1.34	1.26	1.19	1.31
10.	Kab. Lamongan	1.36	1.41	1.44	1.36	1.39
11.	Kab. Lumajang	1.34	1.37	1.36	1.36	1.29
12.	Kab. Madiun	1.23	1.26	1.24	1.28	1.27
13.	Kab. Magetan	1.22	1.23	1.24	1.21	1.26
14.	Kab. Malang	1.32	1.40	1.42	1.59	1.58
15.	Kab. Mojokerto	1.42	1.45	1.46	1.50	1.46
16.	Kab. Nganjuk	1.33	1.33	1.35	1.40	1.29
17.	Kab. Ngawi	1.21	1.23	1.23	1.26	1.25
18.	Kab. Pacitan	1.21	1.24	1.25	1.20	1.23
19.	Kab. Pamekasan	1.20	1.23	1.24	1.25	1.27
20.	Kab. Pasuruan	1.43	1.48	1.51	1.42	1.44
21.	Kab. Ponorogo	1.24	1.28	1.28	1.27	1.00
22.	Kab. Probolinggo	1.22	1.24	1.24	1.20	1.21
23.	Kab. Sampang	1.20	1.24	1.25	1.20	1.24
24.	Kab. Sidoarjo	1.99	2.07	2.09	1.98	2.05
25.	Kab. Situbondo	1.19	1.24	1.30	1.28	1.29
26.	Kab. Sumenep	1.19	1.20	1.19	1.23	1.18
27.	Kab. Trenggalek	1.28	1.31	1.31	1.24	1.28

28.	Kab. Tuban	1.31	1.41	1.40	1.44	1.33
29.	Kab. Tulungagung	1.32	1.33	1.29	1.32	1.39
30.	Kota Batu	1.32	1.42	1.45	1.40	1.47
31.	Kota Blitar	1.36	1.40	1.46	1.49	1.46
32.	Kota Kediri	1.40	1.40	1.47	1.47	1.44
33.	Kota Madiun	1.40	1.44	1.45	1.46	1.47
34.	Kota Malang	1.63	1.80	1.88	1.92	2.06
35.	Kota Mojokerto	1.47	1.50	1.50	1.54	1.49
36.	Kota Pasuruan	1.31	1.36	1.31	1.34	1.42
37.	Kota Probolinggo	1.41	1.46	1.53	1.55	0.15
38.	Kota Surabaya	3.65	3.85	4.19	3.81	3.87

Lampiran 4. Lampiran Output Eviews

1. Hasil Statistik Deskriptif

Date: 07/04/26 Time: 20:39
Sample: 2019 2023

	Y	X1	X2
Mean	1.442540	2434.083	1673.523
Median	1.340000	2277.200	1699.760
Maximum	4.320000	9533.440	4145.430
Minimum	0.150000	88.57000	522.3600
Std. Dev.	0.468993	1361.830	651.0332
Skewness	4.221474	2.450802	0.380580
Kurtosis	24.14158	12.53580	3.890963
Jarque-Bera	4081.218	905.2878	10.81378
Probability	0.000000	0.000000	0.004486
Sum	272.6400	460041.7	316295.8
Sum Sq. Dev.	41.35138	3.49E+08	79682709
Observations	189	189	189

1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.580193	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	164.332944	37	0.0000

11. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	97.247288	2	0.0000

2. Hasil Uji Lagrange Multiplier

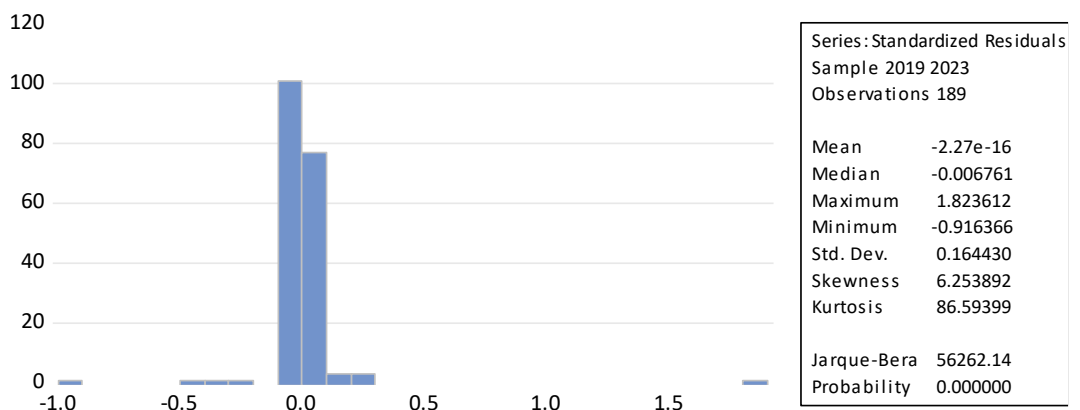
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	5.336316 (0.0209)	0.376000 (0.5398)	5.712316 (0.0168)
Honda	2.310047 (0.0104)	-0.613188 (0.7301)	1.199860 (0.1151)
King-Wu	2.310047 (0.0104)	-0.613188 (0.7301)	0.139028 (0.4447)
Standardized Honda	2.646187 (0.0041)	-0.341808 (0.6338)	-3.274589 (0.9995)
Standardized King-Wu	2.646187 (0.0041)	-0.341808 (0.6338)	-2.843167 (0.9978)
Gourieroux, et al.	--	--	5.336316 (0.0278)

3. Hasil Uji Normalitas



4. Uji Multikolinieritas

	X2	X1
X2	1.000000	0.738564
X1	0.738564	1.000000

5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/04/26 Time: 21:40
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (unbalanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.218825	0.040015	5.468551	0.0000
X1	1.37E-05	1.03E-05	1.322523	0.1880
X2	-0.000119	3.07E-05	-3.893442	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.681283	Mean dependent var	0.052184
Adjusted R-squared	0.597861	S.D. dependent var	0.092712
S.E. of regression	0.058793	Akaike info criterion	-2.644115
Sum squared resid	0.515032	Schwarz criterion	-1.958031
Log likelihood	289.8689	Hannan-Quinn criter.	-2.366166
F-statistic	8.166660	Durbin-Watson stat	1.951818
Prob(F-statistic)	0.000000		

6. Hasil Uji t

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X2 X1
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	726.2530	38	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	73.51792	186
Unrestricted LogL	436.6444	186

Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/04/26 Time: 21:05
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (unbalanced) observations: 189
Iterate weights to convergence
Convergence achieved after 20 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.345546	0.003574	376.4311	0.0000
X2	-0.000768	4.69E-06	-163.7426	0.0000
X1	0.000571	3.31E-06	172.4060	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.993841	Mean dependent var	24.93175
Adjusted R-squared	0.993774	S.D. dependent var	36.88762
S.E. of regression	0.191522	Akaike info criterion	-4.588830
Sum squared resid	6.822601	Schwarz criterion	-4.537374
Log likelihood	436.6444	Hannan-Quinn criter.	-4.567984
F-statistic	15006.04	Durbin-Watson stat	1.023876
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.834873	Mean dependent var	1.442540
Sum squared resid	6.828246	Durbin-Watson stat	1.461145

7. Hasil Uji f

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X2 X1
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	726.2530	38	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	73.51792	186
Unrestricted LogL	436.6444	186

Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 07/04/26 Time: 21:05
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 38
Total panel (unbalanced) observations: 189
Iterate weights to convergence
Convergence achieved after 20 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.345546	0.003574	376.4311	0.0000
X2	-0.000768	4.69E-06	-163.7426	0.0000
X1	0.000571	3.31E-06	172.4060	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.993841	Mean dependent var	24.93175
Adjusted R-squared	0.993774	S.D. dependent var	36.88762
S.E. of regression	0.191522	Akaike info criterion	-4.588830
Sum squared resid	6.822601	Schwarz criterion	-4.537374
Log likelihood	436.6444	Hannan-Quinn criter.	-4.567984
F-statistic	15006.04	Durbin-Watson stat	1.023876
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.834873	Mean dependent var	1.442540
Sum squared resid	6.828246	Durbin-Watson stat	1.461145

8. Hasil Koefisien determinasi (R^2)

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: Y C X2 X1

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	726.2530	38	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	73.51792	186
Unrestricted LogL	436.6444	186

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/04/26 Time: 21:05

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 189

Iterate weights to convergence

Convergence achieved after 20 weight iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.345546	0.003574	376.4311	0.0000
X2	-0.000768	4.69E-06	-163.7426	0.0000
X1	0.000571	3.31E-06	172.4060	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.993841	Mean dependent var	24.93175
Adjusted R-squared	0.993774	S.D. dependent var	36.88762
S.E. of regression	0.191522	Akaike info criterion	-4.588830
Sum squared resid	6.822601	Schwarz criterion	-4.537374
Log likelihood	436.6444	Hannan-Quinn criter.	-4.567984
F-statistic	15006.04	Durbin-Watson stat	1.023876
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.834873	Mean dependent var	1.442540
Sum squared resid	6.828246	Durbin-Watson stat	1.461145

Lampiran 5. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Mohammad Ramadhani
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 01 Desember 2002
Alamat Asal : Dsn. Jogoroto Kabupaten Jombang
Telepon/Hp : 087895612682
E-mail : muhammadramadhani149@gmail.com

Pendidikan Formal

2007-2009 : RA perwanida DARUL ULUM Sumber Pengantin
2009-2015 : MI DARUL ULUM 1 Jogoroto
2015-2018 : MTs. MIFTAHUL ULUM Jarakkulon
2018-2021 : MAN 1 Kabupaten Jombang
2021-2026 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2019-2021 : Ketua Ranting IPNU Ranting Jogoroto
2021-Sekarang : Bendahara Ranting(Kecamatan) IKS.PI Kera Sakti
Jogoroto

Aktivitas dan Pelatihan

Peserta Pelatihan ACCURATE Fakultas Ekonomi UIN Malang 2024

Lampiran 6. Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 210502110147
Nama : Mohammad Ramadhani
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Fadlil Abdani, M.A
Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah
Terhadap Kemandirian Fiskal (Kabupaten dan Kota di
Jawa Timur 2019-2023).

JURNAL BIMBINGAN

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	20 Februari 2025	acc judul skripsi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	18 September 2025	Pendaftaran proposal skripsi	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	31 Oktober 2025	REVISI AFTER SEMPRO	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	9 Desember 2025	Revisi	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	4 Maret 2026	pengerjaan bab 4	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	17 Maret 2026	revisi bab 4	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	21 April 2026	pengerjaan bab 5	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	15 Mei 2026	abstrak	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	7 Juni 2026	ACC SIDANG SKRIPSI	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 7 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Fadiil Abdani, M.Aa

Lampiran 7. Bukti Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatullah Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Ramadhani
NIM : 210502110147
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah
(TKD) Terhadap Kemandirian Fiskal (Kabupaten dan Kota
di Jawa Timur 2019-2023).**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS
PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	13%	11%	21%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2026

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd